



WALIKOTA MAGELANG

**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2008**

TENTANG

**CETAK BIRU SISTEM JARINGAN, APLIKASI ELEKTRONIK GOVERNMENT
DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA
DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI
BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang terselenggaranya fungsi sistem pemerintahan yang baik (*Good Government*), perlu adanya panduan umum berupa cetak biru di lingkungan Pemerintah Kota Magelang dalam merencanakan pembangunan sistem jaringan, aplikasi *Electronic-Government* dan pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi;
 - b. bahwa untuk penyusunan kebutuhan sistem jaringan, aplikasi *Electronic-Government* dan peningkatan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi, selanjutnya dapat diterjemahkan kedalam rencana pentahapan pembangunan untuk jangka pendek tahun 2007 dan jangka menengah tahun 2008-2009.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2007 tentang pengesahan dan penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diatur dengan peraturan daerah kota Magelang Nomor 1 tahun 2007;

6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Teknis Sistem Komunikasi dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Depdagri dan Pemda;
 4. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 106 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG CETAK BIRU SISTEM JARINGAN, APLIKASI ELEKTRONIK GOVERNMENT DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA MAGELANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang;
2. Pemerintah daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagaimana penyelenggara pemerintah daerah;
3. Walikota adalah Walikota Magelang;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Magelang;
5. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
6. Kantor Pengolahan Data Elektronik dan Arsip adalah Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai lembaga teknis untuk pengolahan data, sistem informasi dan kearsipan Pemerintah Kota Magelang;
7. Pengelola Data Fungsional adalah Sub Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berfungsi sebagai perangkat pengelola teknologi informasi dan komunikasi;
8. Data adalah sesuatu yang dapat berupa angka, huruf, simbol, gambar dan atau kombinasi dari masing-masing tersebut yang mempunyai pengertian tertentu;
9. Informasi adalah hasil pengolahan data berupa keterangan yang mempunyai bentuk, nilai dan arti bagi pemakai;
10. Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Kota Magelang adalah suatu totalitas yang terpadu, terdiri atas perangkat lunak, perangkat keras, perangkat penyimpanan, perangkat komunikasi dan tenaga pengelola yang saling berkaitan, berketergantungan dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan di lingkungan Pemerintah Kota Magelang;

11. Cetak Biru adalah dokumen layanan kepada masyarakat secara digital Elektronik-Government yang akan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan;
12. Internet adalah jaringan komputer global yang saling berhubungan dan menganut konsep terbuka, sehingga informasi yang ada di dalamnya dapat diakses dari luar;
13. Intranet adalah jaringan informasi lokal berbasis internet yang bersifat tertutup untuk keperluan internal, sehingga informasi yang ada di dalamnya hanya untuk kalangan tertentu;
14. Ekstranet adalah interaksi antara jaringan internet;
15. Nama domain adalah nama alamat situs web;
16. Web Site www.magelangkota.go.id adalah alamat online pada internet milik Pemerintah Kota Magelang;
17. E-mail adalah surat yang mempunyai banyak kelebihan jika dibandingkan dengan pengertian surat biasa;
18. Database adalah sistem basis data yang memuat data terorganisir dengan baik sehingga memudahkan penyimpanan dan pengambilan kembali secara elektronik;
19. Portal adalah sebuah situs web yang memuat keseluruhan informasi secara detail;
20. Telematika adalah pemanfaatan teknologi telekomunikasi, multimedia dan informatika untuk memperlancar akses informasi global;
21. Data center adalah data dan informasi yang proses penyiapan, pengolahan dan penyajian dilakukan di pusat induk jaringan;
22. Desentralisasi data dan informasi adalah proses penyiapan, pengolahan dan penyajian yang distribusikan pada simpul jaringan yang ada di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
23. Fungsi Sistem Kepemerintahan adalah kelompok blok fungsi dan modul-modul yang disusun dalam bagan fungsi pelayanan, administrasi, legislasi, pembangunan, keuangan dan kepegawaian serta dinas dan lembaga;
24. Aplikasi front Office adalah kelompok sistem aplikasi yang orientasi fungsinya langsung memberikan pelayanan kepada penggunaanya;
25. Aplikasi back office adalah kelompok sistem aplikasi yang orientasi fungsinya lebih banyak ditujukan untuk memberikan bantuan pekerjaan yang bersifat administrasi pemerintahan, serta fungsi-fungsi kedinasan dan kelembagaan;
26. Jaringan Komputer adalah prosedur beserta berbagai metode teknis untuk saling menghubungkan berbagai alat dan sumber daya komputer yang ada, sehingga dapat saling bertukar informasi dengan menggunakan sumber daya dalam jaringan yang ada secara bersama-sama;
27. Sumber Daya Manusia adalah sumber daya yang sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi pemerintahan sebagai sumber yang berperan aktif terhadap jalannya organisasi pemerintahan dan proses pengambilan keputusan;
28. *Electoric-Government* adalah penggunaan internet untuk melaksanakan urusan pemerintah dengan penyediaan pelayanan publik yang lebih baik dan cara yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya dokumen Cetak Biru adalah untuk memberikan panduan baku pengembangan Elektronik-Government dengan lingkup pada bidang sistem jaringan komputer, aplikasi Elektronik-Government dan peningkatan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Magelang.

Pasal 3

Tujuan pembuatan dokumen Cetak biru sistem ini adalah:

- a. Penyeragaman perencanaan pengembangan sistem jaringan komputer, aplikasi Elektronik-Government dan peningkatan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Magelang;
- b. Standarisasi sistem jaringan komputer, aplikasi Elektronik-Government peningkatan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi;
- c. Memberikan landasan berpikir bagi pengembangan sistem aplikasi E-Government yang komprehensif, efisien dan efektif.

Pasal 4

Sasaran Pembuatan dokumen Cetak Biru adalah :

- a. Tersedianya data dan informasi yang akurat serta terpadu dalam rangka mendukung pengambilan keputusan di lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
- b. Terciptanya mekanisme pengelolaan informasi yang mantap dan baku;
- c. Terciptanya penyelenggaraan sistem informasi manajemen yang dapat menghubungkan dan mengkomunikasikan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang, dalam satu jaringan komunikasi untuk memperlancar arus informasi timbal balik;
- d. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau;
- e. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah;
- f. Pembentukan mekanisme komunikasi antar lembaga pemerintah serta penyediaan fasilitas bagi partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan;
- g. Cetak Biru akan memberikan panduan yang konsisten dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan Pemerintah Kota Magelang yang spesifik, Pemerintah Kota Magelang dapat menyesuaikan Cetak Biru ini dengan Visi, Misi, Rencana Strategis dan Peraturan Daerah yang berlaku yang akan mempengaruhi kebijakan, rencana dan penerapan program pengembangan Elektronik-Government.

BAB III

RUANG LINGKUP DOKUMEN CETAK BIRU

Pasal 5

Dokumen Cetak Biru Elektronik-Government, sistem jaringan komputer, aplikasi Elektronik-Government dan peningkatan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi berlaku untuk tahun 2007 – 2009.

Pasal 6

Ruang lingkup Dokumen Cetak Biru meliputi :

- a. Dokumen Perangkat Infrastruktur Jaringan dan Aplikasi Kota Magelang;
- b. Dokumen Program Pengembangan Infrastruktur Jaringan dan Aplikasi Jangka Pendek Tahun 2007;
- c. Dokumen Program Pengembangan Infrastruktur Jaringan dan Aplikasi Jangka Menengah Tahun 2008-2009;
- d. Dokumen Peningkatan/Pelatihan Sumber Daya Manusia;
- e. Dokumen Peta Solusi Aplikasi E-Government.

Pasal 7

Cetak Biru Sistem Jaringan Komputer disusun berdasarkan pendekatan dalam pemanfaatan dukungan Teknologi Informasi yang semakin pesat berkembang, merupakan transformasi dari pemerintahan yang bersifat manual dan lambat menuju pemerintahan yang elektronik dan cepat dalam layanan publik dengan tahap Pengembangan Infrastruktur Internal Pemerintah Kota Magelang sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 8

Cetak Biru Sistem Aplikasi E-Government disusun berdasarkan pendekatan fungsional layanan dari sistem pemerintahan yang harus diberikan oleh Pemerintah Kota Magelang kepada masyarakatnya yang disusun dalam Blok Fungsi, Sub Blok Fungsi dan Modul sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 9

Cetak Biru Peningkatan/Pelatihan Sumber Daya Manusia disusun berdasarkan Pola Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 14 JANUARI 2008

WALIKOTA MAGELANG




H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 14 Januari 2008.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

Pelaksana Tugas



MARGIYONO DWI YUWONO, SH. MM

Pembina Utama Muda

NIP. 070 009 928

Asisten Administrasi Ekonomi, Keuangan
dan Kesra

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2008 NOMOR 2

**TAHAP PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR INTERNAL
 PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

Pengembangan Jaringan Komputer Kota Magelang dalam mendukung E-Government untuk peningkatan kapasitas diantaranya di laksanakan dengan peningkatan pemanfaatan WAN (Wide Area Network) Kota Magelang dengan memberikan penambahan fungsional layanan sehingga dapat dimanfaatkan untuk komunikasi antar satuan kerja sampai dengan kelurahan.

No	Infrastruktur	Kegiatan
1	Audit Infrastruktur TI tahap I.	<p>Kegiatan Audit adalah melakukan survey mengenai kondisi teknis infrastruktur, yaitu audit terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis Infrastruktur komputer dan server; 2. Jenis infrastruktur jaringan komputer; 3. Arsitek/konfigurasi jaringan komputer; 4. Koneksi internet; 5. Penggunaan Internet; 6. Jenis software Operation Sistem, Aplikasi perkantoran; 7. Jenis aplikasi SI dan struktur datanya; 8. dan lin-lain yang dianggap perlu. <p>Hasil kegiatan ini adalah dokumen laporan audit infrasturktur TI yang akan dijadikan pegangan dalam menentukan program kegiatan pengembangan infrastruktur TI.</p>
2	Pembangunan Network Operation Canter (NOC) KPDE.	<p>Kegiatan pembangunan NOC KPDE Magelang adalah membangun pusat operasi jaringan Pemerintah Kota Magelang yang akan menjadi pusat pengelolaan seluruh jaringan yang ada di Kota Magelang.</p> <p>Kegiatan ini diharapkan menghasilkan suatu infrastruktur pusat operasi jaringan Pemerintah Kota Magelang yang akan mengelola jaringan LAN seluruh Dinas/Satuan Kerja Pemerintah Kota Magelang. Menggunakan teknologi terbaru kabel atau Wi-fi atau kombinasi keduanya.</p> <p>NOC KPDE akan melakukan pengaturan komunikasi data antar Dinas/Satuan Kerja, mengeloala pembagian Bandwidth internet, mengelola komunikasi Voice dan Video yang berbasis IP yang lewat jaringan SKPD.</p>
3	Pembangunan LAN Dinas-Dinas.	<p>Kegiatan ini membangun LAN di dalam setiap dinas sehingga siap untuk selanjutnya nanti dapat dihubungkan dengan dinas-dinas lainnya.</p> <p>Infrastruktur yang di bangun siap digunakan untuk keperluan Data, Voice dan Video.</p> <p>Menggunakan teknologi terbaru kabel Optik atau wireless atau kombinasi keduanya.</p>
4	Pembangunan WAN SKPD.	<p>Kegiatan yang di laksanakan adalah menghubungkan semua dinas/satuan kerja yang ada di Pemerintah Kota Magelang.</p> <p>Diharapkan dengan kegiatan ini semua dinas/satuan kerja tergabung dalam satu jaringan internal Pemerintah Kota Magelang sehingga akan memungkinkan terjadinya Intergrasi infrastruktur Pemerintah Daerah Magelang.</p>
5	Pembangunan VoIP.	<p>Kegiatan yang dilaksanakan adalah menyediakan infrastruktur VoIP di setiap dinas/satuan kerja yang berbasis IP.</p> <p>Diharapkan dengan infrastruktur VoIP komunikasi antar Dinas/Satuan kerja menjadi lebih cepat dan murah.</p>

6	Pembangunan Call Center.	<p>Kegiatan yang dilaksanakan adalah membangun sebuah call center yang menjadi pusat informasi publik mengenai semua hak berkaitan dengan pemerintah daerah Kota Magelang.</p> <p>Informasi diakses melalui media telepon, fax, sms.</p>
7	Pembangunan Data Center.	<p>Pembangunan data center adalah untuk menyediakan infrastruktur pusat data di Kota Magelang. Pusat data akan diletakkan di NOC KPDE yang sudah di bangun.</p> <p>Hasil kegiatan ini adalah terbangunnya data center yang berisi server-server Database Pemerintah Kota Magelang, server web, server-server aplikasi yang berjalan di jaringan.</p>
8	Audit Infrastruktur TI Tahap II	<p>Kegiatan audit adalah sebagai kelanjutan siklus tahap 5 tahunan untuk mengaudit mengenai kondisi teknis infrastruktur setelah berjalan selama 5 tahun, yaitu audit terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis infrastruktur komputer dan server; 2. Jenis infrastruktur jaringan komputer; 3. Arsitek/konfigurasi jaringan komputer; 4. Koneksi internet; 5. Penggunaan internet; 6. Jenis Software OS, aplikasi perkantoran; 7. dan lin-lain yang dianggap perlu. <p>Hasil kegiatan ini adalah dokumen laporan audit infrastruktur TI yang akan dijadikan bahan dalam membuat blue print lanjutan.</p>
9	Pembangunan WAN Kecamatan.	<p>Kegiatan yang dilaksanakan adalah membangun infrastruktur jaringan sampai ke tingkat kecamatan.</p> <p>Hasil kegiatan ini adalah terhubungnya semua kecamatan ke dalam jaringan Pemerintah Kota Magelang.</p> <p>WAN kecamatan ini nanti diharapkan dapat berfungsi sebagai akses publik untuk menggunakan layanan E-Government.</p> <p>Menggunakan teknologi wireless atau jika memungkinkan menggunakan kabel.</p>
10	Pembangunan WAN Kelurahan.	<p>Kegiatan yang dilakukan adalah membangun infrastruktur jaringan sampai ke tingkat kelurahan, dalam hal ini secara teknis semua kelurahan terhubung ke kecamatan sesuai daerah administrasinya.</p> <p>WAN kelurahan ini diharapkan dapat berfungsi sebagai akses publik untuk menggunakan layanan E-Government.</p> <p>Teknologi yang digunakan bisa teknologi wireless atau jika memungkinkan menggunakan kabel.</p>
11	Blue Print Infrastruktur 2010.	<p>Blue print yang di susun untuk membuat perencanaan pengembangan E-Government 5 (lima) tahun berikutnya yaitu 2010-2015.</p> <p>Perlu disadari bahwa setelah berjalan selama 5 (lima) tahun tentu ada perkembangan-perkembangan terbaru yang perlu diadopsi dalam pengembangan E-Government.</p>

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

**BLOK FUNGSI, SUB BLOK FUNGSI DAN MODUL PENGEMBANGAN APLIKASI
E-GOVERNMENT**

Dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasi fungsi pemerintahan, di susun Modul dan Blok Fungsi serta Sub Blok Fungsi Pengembangan Aplikasi E-Government dengan mengacu sesuai Tugas Pokok Fungsi Organisasi Pemerintah Kota Magelang.

Modul dan Blok Fungsi Pengembangan Aplikasi E-Government.

Blok Fungsi	1. PELAYANAN
Sub-Blok Fungsi	--
Modul	1.1. Kependudukan 1.2. Perpajakan dan Retribusi 1.3. Pendaftaran dan Perijinan 1.4. Bisnis dan Investasi 1.5. Pengaduan Masyarakat 1.6. Publikasi Informasi Umum dan Pemerintahan
Blok Fungsi	2. ADMINISTRASI DAN MANAGEMENT (ADM & MGM)
Sub-Blok Fungsi	--
Modul	2.1. Surat Elektronik 2.2. Sistem Dokumen Elektronik 2.3. Sistem Pendukung Keputusan 2.4. Kolaborasi dan Koordinasi 2.5. Manajemen Pelaporan Pemerintahan
Blok Fungsi	3. LEGISLASI
Sub-Blok Fungsi	--
Modul	3.1. Sistem Administrasi DPRD 3.2. Sistem Pemilu Daerah 3.3. Katalog Hukum, Peraturan dan Perundang-undangan
Blok Fungsi	4. PEMBANGUNAN
Sub-Blok Fungsi	--

Modul	<p>4.1. Sistem Informasi dan Manajemen Data Pembangunan</p> <p>4.2. Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>4.3. Sistem Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>4.4. Pengelolaan dan Monitoring Proyek</p> <p>4.5. Sistem Evaluasi dan Informasi Hasil Pembangunan</p>
Blok Fungsi	5. KEUANGAN
Sub-Blok Fungsi	--
Modul	<p>5.1. Sistem Anggaran</p> <p>5.2. Sistem Kas dan Perbendaharaan</p> <p>5.3. Sistem Akuntansi Daerah</p>
Blok Fungsi	6. KEPEGAWAIAN
Sub-Blok Fungsi	--
Modul	<p>6.1. Pengadaan PNS</p> <p>6.2. Sistem Absensi dan Penggajian</p> <p>6.3. Sistem Penilaian Kinerja PNS</p> <p>6.4. Sistem Pendidikan dan Latihan</p>
Blok Fungsi	7. DINAS DAN LEMBAGA
Sub-Blok Fungsi	7.1. KEPERINTAHAN
Modul	<p>7.1.1. Pengelolaan Barang Daerah</p> <p>7.1.2. Katalog Barang Daerah</p> <p>7.1.3. Pengelolaan Pendapatan Daerah</p> <p>7.1.4. Pengelolaan Perusahaan Daerah</p>
Sub-Blok Fungsi	7.2. KEWILAYAHAN
Modul	<p>7.2.1. Tataruang dan Lingkungan Hidup</p> <p>7.2.2. Potensi Daerah</p> <p>7.2.3. Pertanian, Peternakan dan Perkebunan</p> <p>7.2.4. Perikanan</p> <p>7.2.5. Pariwisata</p> <p>7.2.6. Industri Kecil dan Menengah (IKM)</p>

Sub-Blok Fungsi	7.3. KEMASYARAKATAN
Modul	7.3.1. Kesehatan 7.3.2. Pendidikan 7.3.3. Ketenagakerjaan 7.3.4. Industri dan Perdagangan 7.3.5. Jaring Pengaman Sosial
Sub-Blok Fungsi	7.4. SARANA DAN PRASARANA
Modul	7.4.1. Transportasi 7.4.2. Jalan dan Jembatan 7.4.3. Terminal 7.4.4. Sarana Umum 7.4.5. Pengawasan

1. Blok Fungsi PELAYANAN

1.1. Modul SISTEM KEPENDUDUKAN

Modul	KEPENDUDUKAN
Blok Fungsi	PELAYANAN
Sub-Blok Fungsi	--
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input checked="" type="checkbox"/> Front Office <input type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input checked="" type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran <input type="checkbox"/> Administrasi <input type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input checked="" type="checkbox"/> Generik <input type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<input type="checkbox"/> Pelayanan pendaftaran penduduk. <input type="checkbox"/> Pelayanan dan pengelolaan data mutasi penduduk. <input type="checkbox"/> Pembuatan dan pengelolaan data KK dan KTP. <input type="checkbox"/> Pembuatan dan pengelolaan data Akta Pencatatan Penduduk (akta kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak). <input type="checkbox"/> Pembuatan Buku Induk Penduduk, Buku Mutasi Penduduk dan Buku Tamu. <input type="checkbox"/> Pelaporan data kependudukan.
Narasi	Modul Kependudukan adalah aplikasi pelayanan, pengelolaan dan pengolahan data kependudukan. Aplikasi dilengkapi dengan fitur pelaporan kependudukan (untuk disampaikan kepada Mendagri). Sebagian data kependudukan di publish ke internet untuk keperluan masyarakat.
Organisasi	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Integrasi	<input type="checkbox"/> Sistem Kependudukan di tingkat Kabupaten/Kota lain. <input type="checkbox"/> Sistem Kependudukan di tingkat Propinsi lain. <input type="checkbox"/> Sistem Kependudukan di tingkat Nasional.

Info Tambah	<input type="checkbox"/> Nama Alias: SIAK, SIMDUKCAPIL. <input type="checkbox"/> Dasar Hukum: PERMENDAGRI NOMOR 37 TAHUN 2007. <input type="checkbox"/> Rekomendasi: Membangun jaringan sistem kependudukan di setiap kecamatan yang terhubung ke Pemda, web-based, client-server, automatic data synchronization, distributed processing.
-------------	--

1.2. Modul PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI

Modul	PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI																
Blok Fungsi	PELAYANAN																
Sub-Blok Fungsi	--																
Klasifikasi	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">Jenis Layanan</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Front Office</td> <td><input type="checkbox"/> Back Office</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Layanan Utama</td> <td><input type="checkbox"/> Publikasi Informasi</td> <td><input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Transaksi Data</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Pembayaran</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Administrasi</td> <td><input type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya</td> </tr> <tr> <td>Fungsi Aplikasi</td> <td><input type="checkbox"/> Generik</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Spesifik</td> </tr> <tr> <td>Obyek Layanan</td> <td><input type="checkbox"/> G2G</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C</td> </tr> </table>	Jenis Layanan	<input checked="" type="checkbox"/> Front Office	<input type="checkbox"/> Back Office	Layanan Utama	<input type="checkbox"/> Publikasi Informasi	<input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan	<input type="checkbox"/> Transaksi Data	<input checked="" type="checkbox"/> Pembayaran	<input type="checkbox"/> Administrasi	<input type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya	Fungsi Aplikasi	<input type="checkbox"/> Generik	<input checked="" type="checkbox"/> Spesifik	Obyek Layanan	<input type="checkbox"/> G2G	<input checked="" type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C
Jenis Layanan	<input checked="" type="checkbox"/> Front Office	<input type="checkbox"/> Back Office															
Layanan Utama	<input type="checkbox"/> Publikasi Informasi	<input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan															
	<input type="checkbox"/> Transaksi Data	<input checked="" type="checkbox"/> Pembayaran															
	<input type="checkbox"/> Administrasi	<input type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya															
Fungsi Aplikasi	<input type="checkbox"/> Generik	<input checked="" type="checkbox"/> Spesifik															
Obyek Layanan	<input type="checkbox"/> G2G	<input checked="" type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C															
fungsi	<input type="checkbox"/> Memberikan pelayanan pajak kepada masyarakat yang meliputi pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota. <input type="checkbox"/> Jenis pajak Propinsi terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> o Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan; o Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan; o Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; o Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. <input type="checkbox"/> Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> o Pajak Hotel; o Pajak Restoran; o Pajak Hiburan; o Pajak Reklame; o Pajak Penerangan Jalan; o Sarang Burung; o Tunggakan Pajak; o Pajak Parkir. <input type="checkbox"/> Memberikan pelayanan retribusi kepada masyarakat yang meliputi : <ul style="list-style-type: none"> o Retribusi jasa umum; o Retribusi jasa usaha; o Retribusi perijinan tertentu. <input type="checkbox"/> Memberikan pelayanan pajak dan retribusi yang berkaitan dengan potensi daerah, meliputi pendaftaran dan perijinan bidang: <ul style="list-style-type: none"> o Bidang Perdagangan; o Bidang Pendidikan; o Bidang Kepariwisata; o Bidang Kesehatan; o Bidang Industri Kecil dan Menengah. 																

Narasi	<p>Pajak Daerah dan pajak nasional merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil, terutama mengenai objek dan tarif pajak, sehingga tidak tumpang tindih antara pajak pusat dan Pajak Daerah.</p> <p>Daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak dan Retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.</p>
Organisasi	Dinas / lembaga daerah.
Integrasi	<input type="checkbox"/> Blok Fungsi Administrasi dan Management, Modul Sistem Dokumen Elektronik. <input type="checkbox"/> Blok Fungsi Pelayanan, Modul Pendaftaran dan Perijinan.
Info Tambahan	<input type="checkbox"/> Nama Alias: SIM Pajak dan Retribusi, SIM Perpajakan, SIMTAP, SAMSAT. <input type="checkbox"/> Dasar Hukum: <ul style="list-style-type: none"> - UU 34/2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah; - PP 65/2001 Tentang Pajak Daerah dan PP 66/2001 Tentang Retribusi Daerah; - Perda No. 1/2003; - Perda No.7/2001; - Perda No. 11/2002; - Perda No.14/2002. <input type="checkbox"/> Rekomendasi: Sistem perpajakan daerah dilakukan secara terpadu dan sejalan dengan sistem perpajakan nasional serta saling melengkapi.

1.3. Modul PENDAFTARAN DAN PERIJINAN

Modul	PENDAFTARAN DAN PERIJINAN
Blok Fungsi	PELAYANAN
Sub-Blok Fungsi	--
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input checked="" type="checkbox"/> Front Office <input type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input checked="" type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p><input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p><input type="checkbox"/> Administrasi <input type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<p><input type="checkbox"/> Memberikan pelayanan perijinan meliputi kegiatan : menerima pendaftaran, menyeleksi persyaratan, memberikan keterangan, mengecek kemajuan proses penerbitan perijinan dan menindaklanjuti pengaduan/klaim dari masyarakat.</p> <p><input type="checkbox"/> Pengelolaan dan pengurusan ijin antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); o Ijin Usaha Industri (IUI); o Ijin Minuman Beralkohol; o Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung; o Ijin Pemakaian Tempat Dasaran Kios atau Los Pasar; o Ijin Daftar Ulang tempat Pemakaian Dasaran Kios atau Los Pasar; o Ijin Pindahan Pemakaian Tempat Dasaran Kios atau Los Pasar; o Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); o Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUK); o Ijin Gangguan (HO); o Ijin Usaha Angkutan ; o Ijin Trayek; o Ijin Perubahan dan atau Perpanjangan Masa Berlaku Trayek; o Ijin Perpanjangan Kartu Pengawasan; o Ijin Pemakaian Tempat Kios Terminal; o Ijin Penyelenggaraan Rumah Bersalin; o Ijin Penyelenggaraan Balai Pengobatan; o Ijin Penyelenggaraan Balai Kesehatan Ibu dan Anak; o Ijin Penyelenggaraan Apotik; o Ijin Penyelenggaraan Optikal; o Ijin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Swasta; o Ijin Penyelenggaraan Pedagang Eceran Obat; o Ijin Penyelenggaraan Depot Air Minum Isi Ulang; o Ijin Penyelenggaraan Pemulasaraan Jenazah; o Ijin Pengobatan Tradisional; o Ijin Praktek Ahli Kecantikan; o Ijin Penyelenggaraan Pusat Kebugaran Jasmani; o Ijin Pelayanan Ambulance dan evakuasi Pasien. <p><input type="checkbox"/> Pengelolaan dan pengurusan pendaftaran :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Tanda Daftar Perusahaan; o Tanda Daftar Industri; o Tanda Daftar Gudang. <p><input type="checkbox"/> Pengelolaan pendaftaran dan perijinan yang berkaitan dengan potensi daerah, meliputi pendaftaran dan perijinan bidang:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Bidang Perdagangan; o Bidang Pendidikan; o Bidang Kepariwisata; o Bidang Kesehatan; o Bidang Industri Kecil dan Menengah.
Narasi	<p>Modul Pendaftaran dan Perijinan adalah aplikasi yang dimaksudkan untuk memberikan informasi dan pelayanan perijinan bagi masyarakat yang meliputi : jenis-jenis layanan pendaftaran dan perijinan, persyaratan untuk memperoleh ijin, prosedur perijinan, biaya dan waktu proses perijinan yang diperlukan. Aplikasi dilengkapi dengan form yang bisa di download atau diisi secara on-line.</p> <p>Aplikasi juga dilengkapi dengan formulir dari set dokumentasi yang dipakai untuk mengurus pendaftaran dan perijinan yang disimpan dalam suatu basis data sedemikian sehingga dapat dijamin keseragaman dan tertib administrasinya.</p>
Organisasi	Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal.

Integrasi	<input type="checkbox"/> Blok Fungsi Legislasi, Modul Katalog Hukum, Peraturan dan Perundang-undangan. <input type="checkbox"/> Blok Fungsi Pelayanan, Modul Bisnis dan Investasi.
Info Tambahan	<input type="checkbox"/> Nama Alias: SIM Perijinan, SIM Pelayanan Masyarakat, SIM Pendaftaran. <input type="checkbox"/> Dasar Hukum: Permendagri 24/2006 dan Peraturan Walikota No.23/2006. <input type="checkbox"/> Rekomendasi: Membangun sistem aplikasi Pelayanan Perijinan Terpadu yang melakukan penelitian, pemrosesan dan pengeluaran ijin yang dilakukan secara terpusat dan terkoordinasi dengan Badan/Dinas/Instansi terkait.

1.4. Modul BISNIS DAN INVESTASI

Modul	BISNIS DAN INVESTASI
Blok Fungsi	PELAYANAN
Sub-Blok Fungsi	--
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input checked="" type="checkbox"/> Front Office <input type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran <input checked="" type="checkbox"/> Administrasi <input type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<input type="checkbox"/> Memberikan informasi promosi dan keunggulan daerah berkaitan dengan peluang bisnis dan investasi, terutama di bidang: <ul style="list-style-type: none"> o Bidang Perdagangan; o Bidang Pendidikan; o Bidang Kepariwisata; o Bidang Kesehatan; o Bidang Industri Kecil dan Menengah. <input type="checkbox"/> Memberikan informasi yang jelas tentang syarat-syarat, prosedur dan tatalaksana investasi dan perusahaan kegiatan bisnis lainnya. <input type="checkbox"/> Memberikan pelayanan administrasi penanaman modal di bidang unggulan tersebut.
Narasi	<p>Dalam upaya meningkatkan dan memperkuat kemampuan perekonomian menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional, Pemerintah daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor untuk melakukan kegiatan bisnis dan investasi di daerah tersebut.</p> <p>Pemerintah Daerah dalam hal ini perlu memberikan informasi yang lengkap mengenai keunggulan dan potensi daerahnya, serta memberikan penjelasan yang komprehensif tentang tatacara dan prosedur yang harus dilalui, sehingga para investor tertarik untuk menanamkan modal atau melaksanakan kegiatan usaha di daerah tersebut.</p>
Organisasi	Dinas / lembaga daerah.
Integrasi	<input type="checkbox"/> Blok Fungsi Legislasi, Modul Katalog Hukum, Peraturan dan Perundang-undangan. <input type="checkbox"/> Blok Fungsi Pelayanan, Modul Bisnis dan Investasi Pendaftaran dan Perijinan.
Info Tambahan	<input type="checkbox"/> Nama Alias: SIM Bisnis dan Investasi. <input type="checkbox"/> Dasar Hukum: -- UU No.25/2007; -- PP No.8/2007. <input type="checkbox"/> Rekomendasi: Membangun aplikasi ini dalam satu kerangka pelayanan yang lengkap, termasuk pendaftaran investasi dan administrasinya.

1.5. Modul PENGADUAN MASYARAKAT

Modul	PENGADUAN MASYARAKAT
Blok Fungsi	PELAYANAN
Sub-Blok Fungsi	--
Klasifikasi	Jenis Layanan <input checked="" type="checkbox"/> Front Office <input type="checkbox"/> Back Office Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran <input type="checkbox"/> Administrasi <input type="checkbox"/> Basis Data <input checked="" type="checkbox"/> Lainnya Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik Obyek Layanan <input type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C
Fungsi	<input type="checkbox"/> Menyediakan fasilitas penyampaian dan penyerapan aspirasi, peningkatan partisipasi, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi. <input type="checkbox"/> Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Narasi	Salah satu tugas pemerintah daerah adalah melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai perwujudan demokrasi, dibentuk DPRD sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat.
Organisasi	Dinas / lembaga daerah.
Integrasi	<input type="checkbox"/> Publikasi Informasi Umum dan Pemerintahan.
Info Tambahan	<input type="checkbox"/> Nama Alias: SIM Pengaduan Masyarakat. <input type="checkbox"/> Dasar Hukum: -- <input type="checkbox"/> Rekomendasi: --

1.6. Modul PUBLIKASI INFORMASI UMUM DAN KEPEREMINTAHAN

Modul	PUBLIKASI INFORMASI UMUM DAN KEPEREMINTAHAN
Blok Fungsi	PELAYANAN
Sub-Blok Fungsi	--
Klasifikasi	Jenis Layanan <input checked="" type="checkbox"/> Front Office <input type="checkbox"/> Back Office Layanan Utama <input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran <input type="checkbox"/> Administrasi <input type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya Fungsi Aplikasi <input checked="" type="checkbox"/> Generik <input type="checkbox"/> Spesifik Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input checked="" type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C
Fungsi	<input type="checkbox"/> Publikasi informasi.
Narasi	Mempublikasikan semua informasi umum dan pemerintahan ke seluruh masyarakat termasuk diantaranya; berita dan layanan masyarakat.
Organisasi	Kantor Pengolahan Data Elektronik dan Arsip.
Integrasi	<input type="checkbox"/> Semua aplikasi e-government yang membutuhkan publikasi informasi ke masyarakat.
Info Tambahan	<input type="checkbox"/> Nama Alias: e-Gov Portal. <input type="checkbox"/> Dasar Hukum: Inpres 3 tahun 2003 dan Perkominfo No 28/2006. <input type="checkbox"/> Rekomendasi: Membangun portal pemerintahan yang mencakup fungsi kolaborasi dan koordinasi inter-lembaga (internal portal) dan fungsi publikasi ke masyarakat (public portal).

2. Blok Fungsi ADMINISTRASI DAN MANAGEMENT

Blok Fungsi	ADMINISTRASI DAN MANAGEMENT (ADM & MGM)		
Sub-Blok Fungsi	--		
Klasifikasi	Jenis Layanan	<input checked="" type="checkbox"/> Front Office	<input type="checkbox"/> Back Office
	Layanan Utama	<input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi	<input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan
		<input type="checkbox"/> Transaksi Data	<input type="checkbox"/> Pembayaran
	Fungsi Aplikasi	<input type="checkbox"/> Administrasi	<input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya
	Obyek Layanan	<input checked="" type="checkbox"/> G2G	<input checked="" type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C
Fungsi	<input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi pengelolaan administrasi yang diperlukan dalam urusan pemerintahan daerah. <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi-fungsi lain yang berhubungan dengan managerial pemerintahan daerah.		
Modul	<input type="checkbox"/> Surat Elektronik. <input type="checkbox"/> Sistem Dokumen Elektronik, <input type="checkbox"/> Sistem Pendukung Keputusan. <input type="checkbox"/> Kolaborasi dan Koordinasi. <input type="checkbox"/> Manajemen Pelaporan Pemerintahan.		
Integrasi	<input type="checkbox"/> Blok Fungsi Keuangan. <input type="checkbox"/> Blok Fungsi Pembangunan. <input type="checkbox"/> Blok Fungsi lain yang memerlukan / memberikan informasi ke eksekutif daerah.		

2.1. Modul SURAT ELEKTRONIK

Modul	SURAT ELEKTRONIK		
Blok Fungsi	ADMINISTRASI DAN MANAGEMENT		
Sub-Blok Fungsi	--		
Klasifikasi	Jenis Layanan	<input checked="" type="checkbox"/> Front Office	<input type="checkbox"/> Back Office
	Layanan Utama	<input type="checkbox"/> Publikasi Informasi	<input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan
		<input type="checkbox"/> Transaksi Data	<input type="checkbox"/> Pembayaran
	Fungsi Aplikasi	<input checked="" type="checkbox"/> Administrasi	<input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya
	Obyek Layanan	<input type="checkbox"/> Generik	<input checked="" type="checkbox"/> Spesifik
		<input checked="" type="checkbox"/> G2G	<input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C
Fungsi	<input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi surat-menyurat secara elektronik, termasuk didalamnya memungkinkan proses penyiapan, pembahasan dan pengesahan surat dilakukan secara elektronik. Pembahasan surat itu sendiri bisa dilakukan oleh lebih dari satu orang / unit organisasi. <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi kearsipan (surat masuk / surat keluar) secara elektronik, termasuk didalamnya disposisi, dan tembusan surat. <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi query untuk pencarian data surat secara cepat, misalnya berdasarkan pengirim, tujuan, tanggal, subyek/perihal, nomor, isi, dan lain-lain.		
Narasi	<p>Dalam sistem surat manual, proses penyiapan sampai dengan penyampaian kepada tujuan surat (apalagi jika jaraknya jauh dan tujuannya banyak) bisa memakan waktu lama dan berhari-hari. Dengan sistem elektronik, maka proses tersebut bisa dipersingkat dengan sangat efisien. Proses penyiapan surat kurang lebih sama, tetapi proses penyampaiannya bisa dilakukan dalam hitungan menit, tidak lagi ada kendala jarak dan jumlah tujuan.</p>		
Organisasi	<input type="checkbox"/> Semua unit organisasi, SKPD.		
Integrasi	--		

Info Tambahan	<input type="checkbox"/> Nama alias: e-Mail, SIM Surat. <input type="checkbox"/> Dasar hukum: – Inpres No. 6/2001; – Inpres No. 3/2003. <input type="checkbox"/> Rekomendasi: Membangun sistem surat elektronik secara terpadu dengan ruang lingkup mencakup seluruh Pemerintahan Daerah, karena satu sistem yang sama bisa dipakai oleh semua unit organisasi yang membutuhkan, baik dipakai secara stand-alone ataupun terpusat.
---------------	---

2.2. Modul SISTEM DOKUMEN ELEKTRONIK

Modul	SISTEM DOKUMEN ELEKTRONIK
Blok Fungsi	ADMINISTRASI DAN MANAGEMENT
Sub-Blok Fungsi	--
Klasifikasi	Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office <input checked="" type="checkbox"/> Back Office Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran <input checked="" type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C
Fungsi	<input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi pengelolaan dokumen secara elektronik untuk tercapainya tertib administrasi kearsipan dan pelayanan informasi. <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi kearsipan secara elektronik, termasuk didalamnya penghapusan, pemeliharaan dan pengelolaan status keaktifan. <input type="checkbox"/> Melakukan klasifikasi dan pengelompokan dokumen (kategorisasi) berdasarkan sifat dan kegunaan, diantaranya Dokumen Daerah (yang ditempatkan dalam Lembaran Daerah), arsip daerah, dan lain-lain. <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi konversi dokumen terutama dari bentuk hardcopy menjadi bentuk softcopy. <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi yang memungkinkan pembacaan dokumen dari berbagai sumber dalam berbagai macam format dokumen. <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi query untuk pencarian data dokumen secara lengkap, akurat, dan cepat, misalnya berdasarkan kategori, judul / perihal, tanggal, versi / revisi, nomor, dan lain-lain.
Narasi	<p>Sebagai salah satu sumber informasi terekam, arsip mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting untuk mendukung manajemen modern organisasi pemerintah dan bisnis. Oleh karenanya, arsip harus dikelola dalam suatu sistem secara konseptual dan terpadu melalui cara yang professional.</p> <p>Sistem ini antara lain bertujuan untuk pemeliharaan dan penyelamatan arsip yang memiliki arti penting berkaitan dengan fungsi arsip sebagai sumber sejarah, sumber penelitian, sumber informasi dan bahan untuk menyusun perencanaan, pembuatan kebijakan serta pengambil keputusan bagi pimpinan.</p>
Organisasi	<input type="checkbox"/> Lembaga teknis daerah (badan/kantor arsip). <input type="checkbox"/> Dinas / lembaga yang membutuhkan pengelolaan dokumen.
Integrasi	--
Info Tambahan	<input type="checkbox"/> Nama alias: Document Management, SIM Arsip. <input type="checkbox"/> Dasar hukum: UU No 7/71 dan Peraturan Walikota No.13 tahun 2006. <input type="checkbox"/> Rekomendasi: Membangun sistem pengelolaan dokumen elektronik secara terpadu dengan ruang lingkup mencakup seluruh Pemerintahan Daerah, karena satu sistem yang sama bisa dipakai oleh semua unit organisasi yang membutuhkan, baik dipakai secara stand-alone ataupun terpusat.

2.3. Modul SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN

Modul	SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN
Blok Fungsi	ADMINISTRASI DAN MANAGEMENT
Sub-Blok Fungsi	--
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office <input checked="" type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p><input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p><input type="checkbox"/> Administrasi <input type="checkbox"/> Basis Data <input checked="" type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Membantu eksekutif daerah menjalankan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing, membantu para eksekutif dalam proses pengambilan keputusan dengan menyediakan data dan informasi yang tepat, akurat dan cepat. <input type="checkbox"/> Menyajikan informasi sesuai tingkat urgensitas misalnya: masalah darurat, masalah penting dan masalah yang kurang penting. Sumber informasi bisa dari kalangan internal pemerintah sendiri, bisnis, umum, maupun pemerintah yang lebih tinggi. <input type="checkbox"/> Menyajikan laporan atas aktivitas dari semua bidang pemerintahan baik berupa pelayanan langsung dan administratif maupun pelayanan fasilitatif yang sedang dijalankan oleh semua unit kerja. <input type="checkbox"/> Menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan penggunaanya. Informasi ini lebih bersifat sebagai rangkuman atau laporan dari dinas / lembaga tentang suatu hal khusus, misalnya: pendapatan dan pengeluaran daerah, poyek (dan nilainya) yang sedang berjalan, potensi investasi, dan lain-lain.
Narasi	<p>Seperti diketahui bahwa secara alami informasi memuat berbagai hal (raw data) yang berasal dari berbagai sumber yang terpisah-pisah dan berada dalam berbagai macam format yang berbeda-beda.</p> <p>Disatu sisi, eksekutif membutuhkan aplikasi yang sifatnya sudah jadi (sudah diolah sesuai kebutuhan), akurat, mudah didapat secara cepat dan siap pakai.</p> <p>Sistem ini dibangun untuk menjawab kebutuhan eksekutif terhadap informasi tersebut.</p>
Organisasi	Kantor PDE dan Arsip.
Integrasi	<input type="checkbox"/> Semua sistem yang memberikan laporan kinerja kepada eksekutif daerah.
Info Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nama alias: Data Center. <input type="checkbox"/> Dasar hukum: Inpres 3 tahun 2003. <input type="checkbox"/> Rekomendasi: Membangun sistem DSS dengan mencantumkan (mendefinisikan) semua spesifikasi pelaporan eksekutif yang diharapkan untuk dipenuhi, mencakup semua informasi dari seluruh unit organisasi, sehingga memungkinkan sistem lain untuk melakukan integrasi data sesuai dengan yang diharapkan.

2.4. Modul KOLABORASI DAN KOORDINASI

Modul	KOLABORASI DAN KOORDINASI
Blok Fungsi	ADMINISTRASI DAN MANAGEMENT
Sub-Blok Fungsi	--
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office <input checked="" type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p><input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Administrasi <input type="checkbox"/> Basis Data <input checked="" type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input checked="" type="checkbox"/> Generik <input type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi pengelolaan agenda (penyiapan agenda, alokasi waktu, pengingat tanggal, partisipan, dan lain-lain). Contoh: pengelolaan agenda kerja tiap unit organisasi. <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi Task To Do (penjadwalan), misalnya rapat. Sistem dengan mudah dapat mengalokasikan jadwal rapat, menyesuaikan dengan agenda dari peserta yang harus diundang, distribusi undangan, pemakian ruang rapat dan sebagainya. <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi penugasan, yang memungkinkan pendelegasian pekerjaan (termasuk surat tugasnya) dan laporan pertanggung jawabannya dapat dilakukan secara elektronik. <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi-fungsi lain yang memudahkan koordinasi kerja seperti forum, chat, news, poling, dan lain-lain. <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi Rapat On-Line.
Narasi	<p>Sistem ini menyediakan fungsi otomasi kantor yang berorientasi pada kemudahan proses kerja dan kemudahan koordinasi kerja antar pegawai.</p> <p>Misalnya: dengan mempublikasikan agenda ke setiap unit organisasi akan memudahkan sinkronisasi pekerjaan, terutama antara agenda pimpinan dan kepala dinas/lembaga teknis daerah terkait. Misalkan ada beberapa kegiatan yang terjadi di waktu yang sama, maka hal ini sudah dapat diketahui sebelumnya sehingga penjadwalan kembali bisa segera dilakukan.</p> <p>Contoh lain: dengan kemajuan teknologi IT dimungkinkan untuk menyelenggarakan rapat tanpa peserta rapat harus hadir di satu tempat yang sama. Rapat dapat dilakukan dengan cara melihat dan mendengarkan penyampaian atau mengemukakan pendapat lewat peralatan audio visual (misalnya: TV atau layar komputer).</p>
Organisasi	Semua unit organisasi.
Integrasi	--
Info Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nama alias: -- <input type="checkbox"/> Dasar hukum: -- <input type="checkbox"/> Rekomendasi: Membangun sistem ini cukup satu untuk seluruh unit organisasi Pemerintah Daerah.

2.5. Modul MANAJEMEN PELAPORAN PEMERINTAHAN

Modul	MANAJEMEN PELAPORAN PEMERINTAHAN
Blok Fungsi	ADMINISTRASI DAN MANAGEMENT
Sub-Blok Fungsi	--
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office <input checked="" type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p><input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Administrasi <input type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Menyediakan sarana pelaporan eksekutif (Pemerintah Daerah) kepada instansi yang lebih atas sampai ke pemerintah pusat melalui Mendagri. <input type="checkbox"/> Menyediakan laporan-laporan dengan format baku, dengan data yang sudah diolah. Melalui sistem ini, eksekutif sudah tidak perlu lagi mengolah data yang masih mentah. <input type="checkbox"/> Menyediakan sarana pelaporan kepala dinas dan lembaga kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. <input type="checkbox"/> Menyediakan sarana pelaporan kepala daerah kepada DPRD.
Narasi	Dalam sistem pemerintahan daerah ada mekanisme pelaporan yang harus dilakukan oleh para penyelenggara pemerintahan. Sistem ini membantu Pemerintah Daerah dalam membuat sistem pelaporan elektronik (penyiapan dan pengolahan data pelaporan secara elektronik) sehingga mempercepat proses kerja dan meningkatkan efisiensi pekerjaan.
Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Eksekutif Daerah. <input type="checkbox"/> Kepala Dinas / Lembaga Teknis Daerah.
Integrasi	--
Info Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nama alias: -- <input type="checkbox"/> Dasar hukum: -- <input type="checkbox"/> Rekomendasi: Membangun sistem ini cukup satu untuk seluruh unit organisasi Pemerintah Daerah.

3. Blok Fungsi LEGISLASI

Blok Fungsi	LEGISLASI
Sub-Blok Fungsi	--
Fungsi	<input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi pengolahan dan pengelolaan data dan informasi legislatif, termasuk didalamnya data produk hukum pemerintah daerah. <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi-fungsi lain yang mendukung tugas sekretaris dewan dan tugas DPRD yang belum dilayani oleh sistem lain.
Modul	<input type="checkbox"/> Sistem Administrasi DPRD. <input type="checkbox"/> Sistem Pemilu Daerah. <input type="checkbox"/> Katalog Hukum, Peraturan dan Perundang-Undangan.
Integrasi	<input type="checkbox"/> Blok Fungsi Dinas Lembaga. <input type="checkbox"/> Blok Fungsi Pelayanan.

3.1 Modul SISTEM ADMINISTRASI DPRD

Modul	SISTEM ADMINISTRASI DPRD		
Blok Fungsi	LEGISLASI		
Sub-Blok Fungsi	--		
Klasifikasi	Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office <input checked="" type="checkbox"/> Back Office Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran <input checked="" type="checkbox"/> Administrasi <input type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C		
Fungsi	<input type="checkbox"/> Memfasilitasi pekerjaan Sekretaris DPRD: <ul style="list-style-type: none"> o Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD; o Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD; o Dan lain-lain. <input type="checkbox"/> Memfasilitasi pekerjaan DPRD: <ul style="list-style-type: none"> o Penjadwalan rapat, dan pengelolaan dokumen hasil rapat; o Pengelolaan dokumen hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah; o Dan lain-lain. 		
Narasi	<p>Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, sekretaris daerah dan juga DPRD memerlukan alat bantu yang mempercepat proses kerjanya, sehingga selaras dengan ritme yang ada di eksekutif. Beberapa aplikasi bisa dipakai secara bersama seperti surat elektronik, document management, dan fungsi-fungsi yang tergabung dalam colaboration and coordination.</p> <p>Meskipun begitu ada beberapa sistem khusus yang perlu disediakan, terutama yang berhubungan dengan proses kerja internal DPRD.</p>		
Organisasi	<input type="checkbox"/> Setwan DPRD.		
Integrasi	--		
Info Tambahan	<input type="checkbox"/> Nama alias: -- <input type="checkbox"/> Dasar hukum: -- <input type="checkbox"/> Rekomendasi: --		

3.2 Modul SISTEM PEMILU DAERAH

Modul	SISTEM PEMILU DAERAH		
Blok Fungsi	LEGISLASI		
Sub-Blok Fungsi	--		
Klasifikasi	Jenis Layanan	<input type="checkbox"/> Front Office	<input checked="" type="checkbox"/> Back Office
	Layanan Utama	<input type="checkbox"/> Publikasi Informasi	<input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan
		<input type="checkbox"/> Transaksi Data	<input type="checkbox"/> Pembayaran
		<input checked="" type="checkbox"/> Administrasi	<input type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya
	Fungsi Aplikasi	<input type="checkbox"/> Generik	<input checked="" type="checkbox"/> Spesifik
	Obyek Layanan	<input checked="" type="checkbox"/> G2G	<input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C
Fungsi	<input type="checkbox"/> Memfasilitasi pelaksanaan sistem pemilihan umum daerah, dimulai dari proses pendaftaran pemilih, pemilihan dan penghitungan suara hasil pemilu.		
Narasi	UU 32/2004 memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan sendiri pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung. Pemilu daerah adalah proses yang kompleks (sama dengan pemilu nasional, hanya dengan lingkup yang lebih kecil). Oleh karena itu dengan bantuan sistem elektronik, proses pemilu daerah dapat dilaksanakan dengan lebih sukses, transparan, dan cepat.		
Organisasi	<input type="checkbox"/> DPRD.		
Integrasi	--		
Info Tambahan	<input type="checkbox"/> Nama alias: SIM Pemilu. <input type="checkbox"/> Dasar hukum: UU 32/2004. <input type="checkbox"/> Rekomendasi: membangun sistem pemilu daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat (KPU).		

3.3 Modul KATALOG HUKUM, PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Modul	KATALOG HUKUM, PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN		
Blok Fungsi	LEGISLASI		
Sub-Blok Fungsi	--		
Klasifikasi	Jenis Layanan	<input checked="" type="checkbox"/> Front Office	<input type="checkbox"/> Back Office
	Layanan Utama	<input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi	<input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan
		<input type="checkbox"/> Transaksi Data	<input type="checkbox"/> Pembayaran
		<input type="checkbox"/> Administrasi	<input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya
	Fungsi Aplikasi	<input checked="" type="checkbox"/> Generik	<input type="checkbox"/> Spesifik
	Obyek Layanan	<input checked="" type="checkbox"/> G2G	<input checked="" type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C
Fungsi	<input type="checkbox"/> Menyediakan basis data semua produk hukum, peraturan dan perundang-undangan, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, juga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, terutama yang berkaitan langsung dengan Pemerintah Daerah. <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi klasifikasi dan kategorisasi produk hukum sesuai dengan sifat dan tujuannya, seperti perijinan, otonomi daerah, pemerintahan, kedinasan, kelembagaan, dan lain-lain <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi Query yang memudahkan untuk pencarian cepat produk hukum, peraturan dan perundang-undangan berdasarkan nomor, tanggal terbit, judul, kategori, dan lain-lain.		
Narasi	Sistem ini memberikan akses yang cepat dan akurat terhadap produk hukum, peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan oleh pemerintah, kalangan bisnis dan masyarakat luas. Karena semua peraturan ada disini, hal ini akan sangat membantu, terutama masyarakat bisnis dan masyarakat umum dalam mencari informasi produk hukum sesuai dengan kebutuhannya.		

Organisasi	<input type="checkbox"/> Semua Unit Organisasi Pemerintah Daerah. <input type="checkbox"/> DPRD.
Integrasi	--
Info Tambahan	<input type="checkbox"/> Nama alias: SIM Perpu. <input type="checkbox"/> Dasar hukum: UU 32/2004. <input type="checkbox"/> Rekomendasi: Cukup membangun satu sistem untuk seluruh pemerintah daerah.

4. Blok Fungsi PEMBANGUNAN

Blok Fungsi	PEMBANGUNAN
Sub-Blok Fungsi	--
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input checked="" type="checkbox"/> Front Office <input type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p> <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p> <input type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input checked="" type="checkbox"/> Generik <input type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input checked="" type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<input type="checkbox"/> Modul pembangunan menyediakan modul aplikasi yang berfungsi untuk mengelola data dan membantu proses kerja pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan daerah. <input type="checkbox"/> Proses kerja pembangunan daerah meliputi: <ul style="list-style-type: none"> o Perencanaan pembangunan dengan dinas/badan, lembaga dan unit kerja lain dalam lingkungan pemerintah daerah, termasuk dengan instansi pusat di daerah; o Penyusunan rencana strategis daerah dan dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk usulan untuk dimasukkan kedalam program nasional; o Memberi masukan dalam rencana pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah; o Memberikan pelayanan informasi, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan perencanaan daerah; o Memfasilitasi dan mediasi perencanaan kegiatan lintas kabupaten/kota; o Pelaporan kegiatan pelaksanaan pembangunan.
Modul	<input type="checkbox"/> Sistem Informasi dan Management Data Pembangunan. <input type="checkbox"/> Perencanaan Pembangunan Daerah. <input type="checkbox"/> Sistem Pengadaan Barang dan Jasa. <input type="checkbox"/> Pengelolaan dan Monitoring Proyek. <input type="checkbox"/> Sistem Evaluasi dan Informasi Hasil Pembangunan.
Integrasi	<input type="checkbox"/> Blok Fungsi Keuangan. <input type="checkbox"/> Blok Fungsi Administrasi dan Management.

4.1. Modul SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN DATA PEMBANGUNAN

Modul	SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN DATA PEMBANGUNAN
Tema	PEMBANGUNAN
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office <input checked="" type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p> <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p> <input type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<p><input type="checkbox"/> Menyediakan data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggung-jawabkan sebagai bahan masukan bagi penyusunan perencanaan pembangunan.</p> <p><input type="checkbox"/> Data dan informasi yang dimaksud meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Penyelenggaraan pemerintahan daerah; o Organisasi dan tatalaksana pemerintahan daerah; o Kepala daerah, DPRD, perangkat daerah dan PNS ; o Keuangan daerah; o Potensi sumber daya daerah; o Produk hukum daerah; o Kependudukan; o Informasi dasar kewilayahan.
Narasi	Untuk dapat merencanakan pembangunan dengan optimal diperlukan masukan data dan informasi yang akurat dan up-to-date. Informasi tersebut bisa jadi datang dari aplikasi lain, dan tugas aplikasi ini adalah menyediakan data yang tepat untuk pengguna yang tepat.
Organisasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Integrasi	--
Info Tambahan	<p><input type="checkbox"/> Nama Alias: Knowledge Management, Document Management, Data Ware house.</p> <p><input type="checkbox"/> Dasar Hukum: UU 32/2004.</p> <p><input type="checkbox"/> Rekomendasi: Mengembangkan aplikasi dengan tema pembangunan dalam satu alur pengembangan sesuai kerangka kerja BAPPEDA sehingga memudahkan dalam program perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.</p>

4.2. Modul PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Modul	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Blok Fungsi	PEMBANGUNAN
Sub-Blok Fungsi	--
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office <input checked="" type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p> <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Administrasi <input type="checkbox"/> Basis Data <input checked="" type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pembuatan perencanaan pembangunan daerah meliputi semua aspek pembangunan sesuai kewenangan Pemda. <input type="checkbox"/> Perencanaan yang dimaksud meliputi rencana pembangunan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan rencana kerja pembangunan daerah (1 tahun). <input type="checkbox"/> Harus ada mekanisme version dan revision control, sehingga setiap perubahan perencanaan dapat diketahui dan dilacak. <input type="checkbox"/> Termasuk didalamnya template pembuatan renstra oleh tiap satuan kerja pemerintah daerah yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.
Narasi	<p>Perencanaan pembangunan daerah disusun dalam tiga tahapan: rencana jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun). Perencanaan tersebut disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.</p> <p>Untuk dapat merencanakan dengan optimal perlu masukan data dan informasi yang akurat dan up-to-date. Melalui SIM Data Pembangunan, pengguna dapat memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan tersebut.</p>
Organisasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Integrasi	<input type="checkbox"/> Blok Fungsi Pembangunan, Modul Sistem Informasi dan Manajemen Data Pembangunan.
Info Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nama Alias: SimBangDa. <input type="checkbox"/> Dasar Hukum: UU 32/2004. <input type="checkbox"/> Rekomendasi: Mengembangkan aplikasi pembangunan dalam satu alur pengembangan sesuai kerangka kerja BAPPEDA sehingga memudahkan dalam program perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.

4.3. Modul SISTEM PENGADAAN BARANG DAN JASA

Modul	SISTEM PENGADAAN BARANG DAN JASA
Blok Fungsi	PEMBANGUNAN
Sub-Blok Fungsi	--
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office <input checked="" type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p> <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input checked="" type="checkbox"/> Generik <input type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Menyediakan template dan alur kerja elektronik untuk mempersiapkan proyek (pengadaan barang dan jasa) sesuai dengan KepPres 80/2003. <input type="checkbox"/> Sebagai basis data (katalog) proyek, merangkum semua data-data berkaitan dengan semua proyek (pengadaan barang dan jasa) yang pernah dilaksanakan Pemda. <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi penjadwalan pelaksanaan proyek-proyek yang sudah disetujui agar terjadi sinergi pembangunan di seluruh wilayah pemerintahan daerah. <input type="checkbox"/> Masukan bagi proses pengelolaan dan monitoring proyek. <input type="checkbox"/> Menyediakan sarana untuk pengumuman pekerjaan (d disesuaikan dengan sifat pekerjaan) dan proses pendaftaran bagi para penyedia barang dan jasa yang dibutuhkan oleh Pemda, termasuk pengumuman siapa yang menjadi pemenang (pelaksana) pekerjaan.
Narasi	<p>Sistem ini dimaksudkan untuk menyamakan pola pikir dan persepsi, serta memberikan pedoman pelaksanaan teknis dan administratif yang lebih jelas, sehingga memudahkan semua pihak terkait (perencana, pelaksana, pengawas dan penyedia barang / jasa) dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peranannya masing-masing.</p> <p>Sistem ini dimaksudkan untuk pengelolaan proses pengadaan barang sebelum kontrak. Setelah penandatanganan kontrak maka pekerjaan (proyek) selanjutnya dikelola dengan Sistem Pengelolaan dan Monitoring Proyek.</p>
Organisasi	Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Integrasi	<input type="checkbox"/> Blok Fungsi Pembangunan, Modul Pengelolaan dan Monitoring Proyek.
Info Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nama Alias: SimProyek, e-Procurement. <input type="checkbox"/> Dasar Hukum: KepPres 80/2003. <input type="checkbox"/> Rekomendasi: Mengembangkan aplikasi dengan tema pembangunan dalam satu alur pengembangan sesuai kerangka kerja BAPPEDA sehingga memudahkan dalam program perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.

4.4. Modul PENGELOLAAN DAN MONITORING PROYEK

Modul	PENGELOLAAN DAN MONITORING PROYEK
Blok Fungsi	PEMBANGUNAN
Sub-Blok Fungsi	--
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office <input checked="" type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p> <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input checked="" type="checkbox"/> Generik <input type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<p><input type="checkbox"/> Pengelolaan dan pemantauan terhadap pekerjaan (proyek) pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah:</p> <p> Pekerjaan (proyek) yang dimaksud meliputi proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh dinas dan lembaga teknis Pemda, termasuk Kecamatan dan Kelurahan.</p> <p><input type="checkbox"/> Membuat indikator progres (kemajuan) dan status pekerjaan berkaitan dengan penyerapan dana dan kemajuan fisik pembangunan:</p> <p> Memonitor status kemajuan pekerjaan tersebut untuk mendapatkan laporan status yang komprehensif (misal penyerapan dana vs kemajuan fisik).</p> <p><input type="checkbox"/> Menyediakan template pelaporan untuk eksekutif (kepala daerah dan kepala bappeda) yang menyajikan rangkuman semua proyek pembangunan yang ada di daerah tersebut.</p>
Narasi	<p>Pekerjaan pembangunan (proyek) di suatu wilayah Pemda dalam 1 tahun jumlahnya cukup banyak. Di sisi lain, eksekutif daerah membutuhkan informasi tentang status pelaksanaan yang rinci dari semua proyek yang sedang dikerjakan, terutama menyangkut masalah: berapa besar dana yang sudah dikeluarkan, berapa besar lagi dana yang harus dikeluarkan bulan ini untuk proyek tersebut, sudah seberapa jauh kemajuan fisik di lapangan, apakah ada kemungkinan proyek yang terlambat, dan lain-lain.</p> <p>Oleh karena itu diperlukan sistem pengelolaan dan monitoring proyek yang dapat merangkum dan memonitor semua pekerjaan yang ada dan menyajikan laporan rinci kepada eksekutif daerah sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.</p>
Organisasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Integrasi	<input type="checkbox"/> Blok Fungsi Pembangunan, Modul Sistem Pengadaan Barang dan Jasa.
Info Tambahan	<p><input type="checkbox"/> Nama Alias: SimProyek.</p> <p><input type="checkbox"/> Dasar Hukum: KepPres 80/2003.</p> <p><input type="checkbox"/> Rekomendasi: Mengembangkan aplikasi dengan tema pembangunan dalam satu alur pengembangan sesuai kerangka kerja BAPPEDA sehingga memudahkan dalam program perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.</p>

4.5. Modul SISTEM EVALUASI DAN INFORMASI HASIL PEMBANGUNAN

Modul	SISTEM EVALUASI DAN INFORMASI HASIL PEMBANGUNAN		
Tema	PEMBANGUNAN		
Klasifikasi	Jenis Layanan	<input type="checkbox"/> Front Office	<input checked="" type="checkbox"/> Back Office
	Layanan Utama	<input type="checkbox"/> Publikasi Informasi	<input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan
		<input type="checkbox"/> Transaksi Data	<input type="checkbox"/> Pembayaran
		<input type="checkbox"/> Administrasi	<input type="checkbox"/> Basis Data <input checked="" type="checkbox"/> Lainnya
	Fungsi Aplikasi	<input type="checkbox"/> Generik	<input checked="" type="checkbox"/> Spesifik
	Obyek Layanan	<input checked="" type="checkbox"/> G2G	<input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C
Klasifikasi	Jenis Layanan	<input type="checkbox"/> Front Office	<input checked="" type="checkbox"/> Back Office
	Layanan Utama	<input type="checkbox"/> Publikasi Informasi	<input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan <input type="checkbox"/> Transaksi Data
		<input type="checkbox"/> Pembayaran	<input type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Lainnya
	Fungsi Aplikasi	<input checked="" type="checkbox"/> Generik	<input type="checkbox"/> Spesifik
	Obyek Layanan	<input checked="" type="checkbox"/> G2G	<input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C
Fungsi	<input type="checkbox"/> Pengelolaan dan pemantauan terhadap hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah: Hasil pembangunan yang dimaksud meliputi pembangunan yang dilaksanakan oleh dinas dan lembaga teknis, termasuk Kecamatan dan Kelurahan.		
	<input type="checkbox"/> Menyediakan template evaluasi untuk memungkinkan dilaksanakannya verifikasi hasil pembangunan terhadap yang telah direncanakan.		
	<input type="checkbox"/> Menyediakan pelaporan untuk eksekutif (kepala daerah dan kepala bappeda) yang menyajikan rangkuman semua hasil pembangunan yang ada di daerah tersebut.		
Narasi	Sistem ini diperlukan untuk membantu Pemerintah Daerah dan masyarakat yang selama ini susah untuk mendapatkan informasi hasil pembangunan daerah. Padahal informasi ini sangat dibutuhkan untuk menunjukkan bahwa memang ada aktifitas pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti diamanatkan oleh undang-undang.		
	Informasi tersebut juga dibutuhkan oleh aparat pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi proses perencanaan pembangunan selanjutnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih program pembangunan antar dinas/lembaga yang ada.		
Organisasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.		
Integrasi	<input type="checkbox"/> Blok Fungsi Pembangunan, Modul Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.		
Info Tambahan	<input type="checkbox"/> Nama Alias: SIMBANGDA. <input type="checkbox"/> Dasar Hukum: -- UU No.32/2004; -- UU No.33/2004; -- UU No.25/2004. <input type="checkbox"/> Rekomendasi: Mengembangkan aplikasi dengan tema pembangunan dalam satu alur pengembangan sesuai kerangka kerja BAPPEDA sehingga memudahkan dalam program perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.		

5. Blok Fungsi KEUANGAN

Blok Fungsi	KEUANGAN
Sub-Blok Fungsi	--
Fungsi	<input type="checkbox"/> Menyelenggarakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang tepat, lengkap dan tertib atas transaksi Keuangan Daerah, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. <input type="checkbox"/> Meningkatkan kualitas management Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian anggaran yang efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. <input type="checkbox"/> Menyediakan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang akurat, aktual, mudah dipahami, relevan dan berdayaguna.
Modul	<input type="checkbox"/> Sistem Anggaran. <input type="checkbox"/> Sistem Kas dan Perbendaharaan. <input type="checkbox"/> Sistem Akuntansi Daerah.
Integrasi	<input type="checkbox"/> Blok Fungsi Dinas Lembaga.

5.1. Modul SISTEM ANGGARAN

Modul	SISTEM ANGGARAN
Blok Fungsi	KEUANGAN
Sub-Blok Fungsi	--
Klasifikasi	Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office <input checked="" type="checkbox"/> Back Office Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran <input checked="" type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya Fungsi Aplikasi <input checked="" type="checkbox"/> Generik <input type="checkbox"/> Spesifik Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C
Fungsi	<input type="checkbox"/> Menyusun perencanaan anggaran, perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Menampung usulan anggaran semua unit kerja, membantu proses verifikasi besaran uang dan ketepatan pos rekening dari setiap usulan, serta memfasilitasi proses scrubbing, revisi-revisi dan pembahasan di Tim Anggaran untuk diajukan ke Panitia Anggaran. <input type="checkbox"/> Mencetak dokumen anggaran: APBD, RKA, DPA . <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi analisa standar belanja, bertujuan untuk melihat kewajaran besaran nilai usulan kegiatan yang diajukan unit kerja, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan rencana kegiatan yang diajukan. <ul style="list-style-type: none"> o Menyediakan fungsi penyusunan harga pokok satuan dan penekanan tugas, dan standar biaya kegiatan/harga pokok kegiatan. o Menyimpan harga pokok satuan dan penekanan tugas, dan standar biaya kegiatan/harga pokok kegiatan dalam suatu basis data yang bisa dipakai sebagai rujukan.
Narasi	Sistem anggaran merupakan alat bantu dalam memasukan dan memproses data anggaran dari RAPBD sampai terbentuknya APBD, serta otorisasi penggunaan anggaran belanja.
Organisasi	<input type="checkbox"/> Unit organisasi pengelola Keuangan Daerah.
Integrasi	<input type="checkbox"/> Blok Fungsi Keuangan, Modul Sistem Kas dan Perbendaharaan. <input type="checkbox"/> Blok Fungsi Keuangan, Modul Sistem Akuntansi Daerah.
Info Tambahan	<input type="checkbox"/> Nama alias: MAKUDA, SIMKEU, SIM Anggaran. <input type="checkbox"/> Dasar hukum: PP No 58/2005 dan Permendagri 13/2006. <input type="checkbox"/> Rekomendasi: Membangun sistem keuangan secara utuh meliputi modul anggaran, sistem kas dan perbendaharaan serta sistem akuntansi daerah.

5.2. Modul SISTEM KAS DAN PERBENDAHARAAN

Modul	SISTEM KAS DAN PERBENDAHARAAN
Blok Fungsi	KEUANGAN
Sub-Blok Fungsi	--
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office <input checked="" type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p><input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Administrasi <input type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input checked="" type="checkbox"/> Generik <input type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi kas anggaran, melakukan sinkronisasi antara pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk membantu agar pelaksanaan kegiatan di lapangan tidak mengalami masalah keuangan. <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi monitoring terhadap realisasi anggaran, pendapatan dan belanja daerah. <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi pengelolaan kas daerah, mencatat dan mengelola arus keluar, arus masuk dan penyimpanan uang pmda. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Membantu proses pembayaran keuangan kepada pihak yang telah ditunjuk; <input type="checkbox"/> Menerima dana masukan dari perolehan setoran pendapatan dari unit organisasi / pihak penyeter.
Narasi	Sistem ini merupakan alat pengawasan keluar-masuknya dana dari seluruh aliran dana berdasarkan sumber dana maupun penggunaannya melalui Kas Umum Daerah atau Kas Daerah pada saat merealisasikan APBD.
Organisasi	<input type="checkbox"/> Unit organisasi pengelola Keuangan Daerah.
Integrasi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Blok Fungsi Keuangan, Modul Sistem Anggaran. <input type="checkbox"/> Blok Fungsi Keuangan, Modul Sistem Akuntansi Daerah.
Info Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nama alias: MAKUDA, SIMKEU, SIM Perbendaharaan. <input type="checkbox"/> Dasar hukum: PP 58/2005 dan Permendagri 13/2006. <input type="checkbox"/> Rekomendasi: Membangun sistem keuangan secara utuh meliputi modul anggaran, sistem kas dan perbendaharaan serta sistem akuntansi daerah.

5.3. Modul SISTEM AKUNTANSI DAERAH

Modul	SISTEM AKUNTANSI DAERAH
Blok Fungsi	KEUANGAN
Sub-Blok Fungsi	--
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office <input checked="" type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p><input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Administrasi <input type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input checked="" type="checkbox"/> Generik <input type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mengelola dan membina administrasi dan pembukuan keuangan daerah. <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi pengelolaan akuntansi keuangan daerah, mengidentifikasi dan mengelompokkan data-data transaksi untuk keperluan penyusunan buku besar. <input type="checkbox"/> Menyusun laporan resume kondisi keuangan bagi eksekutif daerah, berdasarkan pada data yang tersedia pada semua modul keuangan lainnya seperti pendapatan, belanja langsung dan tak langsung baik publik maupun aparatur, pembiayaan, dana cadangan dll. <ul style="list-style-type: none"> o Resume bisa dilakukan setiap saat. o Hasil resume merupakan merupakan kondisi terbaru saat itu dan memberikan informasi startegis keuangan misalnya: terjadinya bias dari perencanaan baik volume maupun waktu atas pendapatan atau belanja.
Narasi	<p>Sistem ini mengidentifikasi, dan mengelompokkan data-data transaksi yang tertuang dalam buku besar dan buku pembantu (general ledger dan sub-ledger).</p> <p>Beberapa laporan yang dihasilkan misalnya neraca awal, jurnal penyesuaian, dan laporan konsolidasi (laporan keuangan pemda).</p>
Organisasi	<input type="checkbox"/> Unit organisasi pengelola Keuangan Daerah.
Integrasi	<input type="checkbox"/> Blok Fungsi Keuangan, Modul Sistem Anggaran. <input type="checkbox"/> Blok Fungsi Keuangan, Modul Sistem Kas dan Perbendaharaan.
Info Tambahan	<input type="checkbox"/> Nama alias: MAKUDA, SIMKEU, SIM Akuntansi Daerah. <input type="checkbox"/> Dasar hukum: PP No 58/2005 dan Permendagri 13/2006. <input type="checkbox"/> Rekomendasi: Membangun sistem keuangan secara utuh meliputi modul anggaran, sistem kas dan perbendaharaan serta sistem akuntansi daerah.

6. Blok Fungsi KEPEGAWAIAN

Blok Fungsi	KEPEGAWAIAN
Sub-Blok Fungsi	--
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Modul KEPEGAWAIAN menyediakan modul aplikasi yang berfungsi untuk mengelola data dan membantu proses kerja pemerintah yang berkaitan dengan kepegawaian daerah <input type="checkbox"/> Modul Kepegawaian paling tidak menyediakan aplikasi dengan fungsi-fungsi pengelolaan dan pengolahan data dan informasi untuk proses kerja sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pengadaan (termasuk perencanaan dan persyaratan); <input type="checkbox"/> Penetapan formasi dan penempatan; <input type="checkbox"/> Pengangkatan; <input type="checkbox"/> Pemindahan; <input type="checkbox"/> Pemberhentian; <input type="checkbox"/> Penetapan pensiun, gaji, tunjangan, dan kesejahteraan; <input type="checkbox"/> Hak dan kewajiban; <input type="checkbox"/> Kedudukan hukum; <input type="checkbox"/> Pengembangan kompetensi (pendidikan dan pelatihan); <input type="checkbox"/> Pengendalian jumlah; <input type="checkbox"/> Larangan, sanksi, dan penghargaan.
Modul	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pengadaan PNS. <input type="checkbox"/> Sistem Absensi dan Penggajian. <input type="checkbox"/> Sistem Penilaian Kinerja PNS. <input type="checkbox"/> Sistem Pendidikan dan Latihan.
Integrasi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Blok Fungsi Keuangan. <input type="checkbox"/> Blok Fungsi Administrasi dan Management.

6.1. Modul PENGADAAN PNS

Modul	PENGADAAN PNS		
Blok Fungsi	KEPEGAWAIAN		
Sub-Blok Fungsi	--		
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office <input checked="" type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p><input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input checked="" type="checkbox"/> Generik <input type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C</p>		
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Melakukan administrasi dan pengelolaan data pengadaan pegawai sipil, termasuk didalamnya persyaratan dan tatacara rekrutmen. <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi kerangka kerja (workflow) rekrutmen pegawai PNS dari mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (bagi pendaftar yang diterima). <input type="checkbox"/> Menyediakan basis data pelamar (CPNS) dan modul pelaporannya yang dapat diklasifikasikan, misal per periode pengadaan, jenis kelamin, kelompok umur, daya tampung, dll. 		

Narasi	Sistem ini diharapkan mampu membantu Pemerintah Daerah untuk mendapatkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional dan bertanggung jawab. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
Organisasi	Badan Kepegawaian Daerah.
Integrasi	<input type="checkbox"/> Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan.
Info Tambahan	<input type="checkbox"/> Nama alias: SIMPEG. <input type="checkbox"/> Dasar hukum: Kepmendagri No.17/2000. <input type="checkbox"/> Rekomendasi: Membangun modul sistem aplikasi kepegawaian dalam satu kerangka sistem informasi kepegawaian yang utuh, lengkap dan terintegrasi. Sistem aplikasi tidak harus dalam bentuk satu paket aplikasi, tetapi perencanaan dan rancangannya haruslah komprehensif sehingga terjamin interoperabilitinya, terutama dengan aplikasi e-Government bertema keuangan.

6.2. Modul SISTEM ABSENSI DAN PENGGAJIAN

Modul	SISTEM ABSENSI DAN PENGGAJIAN
Blok Fungsi	KEPEGAWAIAN
Sub-Blok Fungsi	--
Klasifikasi	Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office <input checked="" type="checkbox"/> Back Office Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran <input checked="" type="checkbox"/> Administrasi <input type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya Fungsi Aplikasi <input checked="" type="checkbox"/> Generik <input type="checkbox"/> Spesifik Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C
Fungsi	<input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi absensi pegawai yang akan mencatat jam masuk, jam pulang, jam kerja efektif, kekurangan jam kerja dan kelebihan jam kerja. <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi pengelolaan data-data absensi pegawai, termasuk didalamnya pengelolaan data cuti dan libur pegawai. <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi kalender yang dapat di atur khusus untuk instansi / pemda tertentu. <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi rekapitulasi pelaporan jam kerja pegawai perbulan dengan kategorisasi per satuan kerja, per golongan gaji, per jenis kelamin, dan lain-lain. <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi penggajian pegawai, dll. <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi rekapitulasi pelaporan penggajian dengan kategorisasi jumlah gaji yang dibayar per tahun atau per bulan, jumlah gaji yang dibayar per satuan kerja, dll.
Narasi	Untuk meningkatkan kinerja pegawai, perlu diberi sanksi bagi mereka yang lalai dan penghargaan bagi mereka yang berprestasi. Oleh karena itu perlu diketahui catatan prestasi kerja (salah satunya dalam ukuran jam kerja efektif) dari masing-masing pegawai sebagai bahan masukan penilaian dan pembinaan. Sistem payroll (penggajian) yang disatukan dengan absensi akan mempermudah Pemda dalam mengontrol kinerja pegawainya, terutama jika diinginkan menerapkan kebijakan penghargaan dan hukuman yang dikaitkan dengan penerimaan pendapatan.
Organisasi	<input type="checkbox"/> Badan Kepegawaian Daerah. <input type="checkbox"/> Bagian Keuangan Daerah.
Integrasi	<input type="checkbox"/> Blok Fungsi Keuangan.
Info Tambahan	<input type="checkbox"/> Nama alias: Payroll, SIMPEG. <input type="checkbox"/> Dasar hukum: PP No. 9/2007 (perubahan ke sembilan atas PP No.7/1977). <input type="checkbox"/> Rekomendasi: Membangun modul sistem aplikasi kepegawaian dalam satu kerangka sistem informasi kepegawaian yang utuh, lengkap dan terintegrasi. Sistem aplikasi tidak harus dalam bentuk satu paket aplikasi, tetapi perencanaan dan rancangannya haruslah komprehensif sehingga terjamin interoperabilitasnya.

6.3. Modul PENILAIAN KINERJA PNS

Modul	PENILAIAN KINERJA PNS
Blok Fungsi	KEPEGAWAIAN
Sub-Blok Fungsi	--
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office <input checked="" type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p> <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Administrasi <input type="checkbox"/> Basis Data <input checked="" type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi penilaian kinerja pegawai untuk keperluan kenaikan pangkat dan promosi jabatan. <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi untuk memungkinkan sosialisasi larangan, dan sistem pemberian sanksi dan penghargaan. <input type="checkbox"/> Mengembangkan suatu sistem penilaian yang dapat mengidentifikasi, mengembangkan dan memanfaatkan potensi dan kemampuan pegawai.
Narasi	Sistem ini membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pendawasan pegawai negeri sipil yang menjadi wewangannya. Salah satu manfaat utama adalah bahwa ketersediaan data yang lengkap dan akurat tentang seorang PNS akan sangat bermanfaat bagi pimpinan untuk memberikan penilaian kinerja terhadap PNS tersebut secara transparan, adil dan tepat.
Organisasi	<input type="checkbox"/> Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.
Integrasi	<input type="checkbox"/> Blok Fungsi Kepegawaian, Modul Sistem Absensi dan Penggajian.
Info Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nama alias: SIMPEG. <input type="checkbox"/> Dasar hukum: SE BAKN No.2/SE/1980. <input type="checkbox"/> Rekomendasi: Membangun modul sistem aplikasi kepegawaian dalam satu kerangka sistem informasi kepegawaian yang utuh, lengkap dan terintegrasi. Sistem aplikasi tidak harus dalam bentuk satu paket aplikasi, tetapi perencanaan dan rancangannya haruslah komprehensif sehingga terjamin interoperabilitasnya.

6.4. Modul SISTEM PENDIDIKAN DAN LATIHAN

Modul	SISTEM PENDIDIKAN DAN LATIHAN
Blok Fungsi	KEPEGAWAIAN
Sub-Blok Fungsi	--
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office <input checked="" type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p> <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p> <input type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input checked="" type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<p><input type="checkbox"/> Menyediakan panduan dan sistem informasi kompetensi pegawai.</p> <p><input type="checkbox"/> Menyediakan panduan modul/silabus materi pelatihan yang diperlukan sesuai dengan kompetensinya.</p> <p><input type="checkbox"/> Menyediakan panduan modul/silabus materi pelatihan yang diperlukan sesuai dengan transformasi budaya menuju pemerintahan berbasis IT.</p> <p><input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi yang memungkinkan sistem pelatihan on-line berbasis komputer.</p>
Narasi	<p>Untuk meningkatkan kinerja pegawai, maka pegawai tersebut harus dibekali dengan pengetahuan yang mencukupi di bidangnya. Terutama untuk melaksanakan e-Government, dimana terjadi transformasi budaya kerja dan kebutuhan akan pengetahuan baru sesuai dengan lingkungan baru, maka diperlukan pelatihan-pelatihan yang mendukung. Pelatihan juga diperlukan untuk memberikan bekal pengetahuan yang mencukupi bagi pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai kedudukan dan kewenangannya dalam organisasi.</p>
Organisasi	<input type="checkbox"/> Badan Kepegawaian Daerah.
Integrasi	<input type="checkbox"/> Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Pemerintahan.
Info Tambahan	<p><input type="checkbox"/> Nama alias: SIMDIKLAT.</p> <p><input type="checkbox"/> Dasar hukum: - UU No 8/1974; -- PP No.101/2000.</p> <p><input type="checkbox"/> Rekomendasi: Membangun modul sistem aplikasi kepegawaian dalam satu kerangka sistem informasi kepegawaian yang utuh, lengkap dan terintegrasi. Sistem aplikasi tidak harus dalam bentuk satu paket aplikasi, tetapi perencanaan dan rancangannya haruslah komprehensif sehingga terjamin interoperabilitasnya.</p>

7. Blok Fungsi DINAS DAN LEMBAGA

Blok fungsi DINAS DAN LEMBAGA adalah kelompok fungsi kelembagaan Pemerintahan Daerah, sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, dan juga merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah yang bersifat spesifik. Termasuk di dalam blok fungsi Dinas dan Lembaga tersebut adalah fungsi pemerintahan kecamatan dan kelurahan, serta pengelolaan badan usaha milik daerah, termasuk RSUD.

Blok fungsi DINAS DAN LEMBAGA, berdasarkan obyek layanan dan fungsi utamanya, selanjutnya dibagi menjadi beberapa sub-blok fungsi sebagai berikut:

- Sub-blok fungsi Pemerintahan;
- Sub-blok fungsi Kewilayahan;
- Sub-blok fungsi Kemasyarakatan;
- Sub-blok fungsi Sarana dan Prasarana;
- Sub-blok fungsi Pengawasan.

7.1. Sub-Blok Fungsi KEPERINTAHAN

Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA
Sub-Blok Fungsi	KEPERINTAHAN
Fungsi	<input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi pengelolaan urusan pemerintahan daerah, yang dilaksanakan oleh badan dan lembaga teknis daerah, yang layan utama fungsi tersebut adalah berkaitan dengan pemerintahan. Termasuk didalamnya adalah fungsi pengelolaan barang daerah dan pengelolaan pendapatan daerah. <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi pengelolaan perusahaan milik daerah, termasuk didalamnya adalah RSUD.
Modul	<input type="checkbox"/> Pengelolaan Barang Daerah. <input type="checkbox"/> Katalog Barang Daerah. <input type="checkbox"/> Pengelolaan Pendapatan Daerah. <input type="checkbox"/> Pengelolaan Perusahaan Daerah.
Integrasi	<input type="checkbox"/> Blok Fungsi Keuangan Keuangan. <input type="checkbox"/> Blok Fungsi Pembangunan.

7.1.1 Modul PENGELOLAAN BARANG DAERAH

Modul	PENGELOLAAN BARANG DAERAH		
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA		
Sub-Blok Fungsi	KEPERINTAHAN		
Klasifikasi	Jenis Layanan	<input type="checkbox"/> Front Office	<input checked="" type="checkbox"/> Back Office
	Layanan Utama	<input type="checkbox"/> Publikasi Informasi	<input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan
		<input type="checkbox"/> Transaksi Data	<input type="checkbox"/> Pembayaran
		<input checked="" type="checkbox"/> Administrasi	<input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya
	Fungsi Aplikasi	<input checked="" type="checkbox"/> Generik	<input type="checkbox"/> Spesifik
	Obyek Layanan	<input checked="" type="checkbox"/> G2G	<input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C

Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Perencanaan dan pengadaan kebutuhan barang daerah, memperkirakan kebutuhan barang setiap unit kerja, dengan menghitung beban tugas yang diemban, tupoksi, jumlah pegawai dan keadaan barang saat ini. <input type="checkbox"/> Administrasi penyimpanan dan penyaluran barang daerah. <input type="checkbox"/> Pemeliharaan barang daerah. <input type="checkbox"/> Inventarisasi barang yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah, mencatat aset baru berdasarkan kepada klasifikasi, lokasi, pemegang kuasa, pemanfaatan dan sebagainya. <input type="checkbox"/> Perubahan status hukum barang daerah, memproses administrasi semua barang yang telah habis usia pakai atau ekonomisnya beserta cara penghapusan misalnya: prosedur lelang, hibah, jual dan lainnya. <input type="checkbox"/> Pemanfaatan barang daerah, mendorong aset menjadi bagian yang produktif terutama yang tidak bergerak dan bernilai bisnis, mencatat sejarah dan nilai pemanfaatan aset serta sejarah penggunaan aset. <input type="checkbox"/> Pengamanan barang daerah. <input type="checkbox"/> Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan barang daerah. <input type="checkbox"/> Pembiayaan pengelolaan barang daerah. <input type="checkbox"/> Dan lain-lain.
Narasi	Tujuan sistem pengelolaan barang daerah adalah: terciptanya efisiensi pengelolaan barang daerah, optimalnya pemanfaatan barang daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah serta meningkatnya manfaat barang daerah yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Dinas Daerah. <input type="checkbox"/> Lembaga Teknis Daerah.
Integrasi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Blok Fungsi Pembangunan, Modul Sistem Pengadaan Barang dan Jasa. <input type="checkbox"/> Blok Fungsi Keuangan, Modul Sistem Anggaran. <input type="checkbox"/> Blok Fungsi Dinas dan Lembaga, Modul Katalog Barang daerah.
Info Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nama alias: SIMBARDA. <input type="checkbox"/> Dasar hukum: -- Kepmendagri No. 7/2002; -- Permendagri No. 17/2007. <input type="checkbox"/> Rekomendasi: (1) Membangun sistem pengelolaan aset bersinergi dengan sistem perencanaan dan sistem monitoring proyek (barang dalam proyek menjadi aset setelah proyek selesai). (2) Memastikan bahwa sistem pengelolaan barang bisa memberikan bantuan ke sistem keuangan terutama perkiraan dan perencanaan anggaran.

7.1.2 Modul KATALOG BARANG DAERAH

Modul	KATALOG BARANG DAERAH		
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA		
Sub-Blok Fungsi	KEPEMERINTAHAN		
Klasifikasi	Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office <input checked="" type="checkbox"/> Back Office Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran <input type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C		
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mendaftar semua item barang yang mungkin dibutuhkan oleh pemda dalam menjalankan pemerintahan. <input type="checkbox"/> Memperkirakan nilai barang (dalam Rp) dengan mempertimbangkan faktor-faktor penyusutan, pembayaran cicilan dan bunga, selisih mata uang, proses pemeliharaan dan sebagainya. <input type="checkbox"/> Membuat klasifikasi dan pengelompokan kebutuhan barang per satuan unit kerja pemerintah daerah. <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi query data berdasarkan jenis barang, harga, tahun pembuatan, lokasi, unit kerja, dll. <input type="checkbox"/> Memberikan bantuan dalam penilaian dan verifikasi kewajaran pada usulan anggaran pengadaan barang. 		

Narasi	<p>Sistem katalog barang pada prinsipnya adalah ekstraksi data dari sistem pengelolaan barang daerah, dengan fungsi dan penggunaan khusus sebagai data rujukan.</p> <p>Contoh pengguna sistem ini adalah:</p> <p>(1) Eksekutif daerah, misalnya ingin mengetahui aset yang dimiliki oleh setiap unit kerja, berapa total nilai aset yang dimiliki, aset apa yg dalam waktu dekat akan dimiliki (yang sekarang masih dalam proses pengadaan, dan lain-lain);</p> <p>(2) Panitia pengadaan barang, misalnya untuk mengetahui kewajaran harga penawaran barang baru, atau kewajaran usulan anggaran pengadaan barang oleh satuan kerja, dan lain-lain.</p> <p>Sistem katalog barang daerah disamping membantu eksekutif daerah dalam proses pengambilan keputusan, juga membantu Pemerintah Daerah untuk dapat merencanakan proyek pengadaan barang lebih baik lagi, dengan menyediakan basis data Informasi barang daerah eksisting dan perkiraan harganya.</p>
Organisasi	<input type="checkbox"/> Eksekutif Daerah. <input type="checkbox"/> Dinas / Lembaga Teknis Daerah (Bagian Umum Perlengkapan).
Integrasi	<input type="checkbox"/> Blok Fungsi Pembangunan, Modul Sistem Perencanaan Proyek. <input type="checkbox"/> Blok Fungsi Dinas dan Lembaga, Modul Pengelolaan Barang daerah.
Info Tambahan	<input type="checkbox"/> Nama alias: <input type="checkbox"/> Dasar hukum: -- Kepmendagri No. 7/2002; -- Permendagri No. 17/2007. <input type="checkbox"/> Rekomendasi: Pengelolaan inventarisasi aset daerah sesuai dengan pedoman teknis dan pengelompokan aset daerah berdasarkan Nomor, Kode lokasi dan kode barang daerah.

7.1.3 Modul PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Modul	PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA		
Sub-Blok Fungsi	KEPEMERINTAHAN		
Klasifikasi	Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office <input checked="" type="checkbox"/> Back Office Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran <input checked="" type="checkbox"/> Administrasi <input type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C		
Fungsi	<input type="checkbox"/> Mengidentifikasi dan menginventarisasi semua pos / sumber pendapatan daerah. <input type="checkbox"/> Melakukan klasifikasi jenis pendapatan daerah, misalnya pajak, retribusi, penjualan aset, investasi, keuntungan perusahaan daerah, dan lain-lain. <input type="checkbox"/> Merencanakan target pendapatan tahunan berdasarkan statistik data pendapatan tahun-tahun sebelumnya, disesuaikan dengan variabel prediksi pendapatan tahun berjalan. <input type="checkbox"/> Melakukan simulasi dan prakiraan pendapatan pemda tahun depan, dengan asumsi normal yang berlaku menyeluruh pada rincian obyek pendapatan maupun dengan prakiraan melakukan perubahan pada sub rincian obyek pendapatan lokal. <p>Perubahan sub rincian obyek pendapatan termasuk berubahnya volume obyek sesuai dengan rekening subrincian, atau bahkan terjadinya penambahan atau pengurangan rincian obyek pendapatan.</p>		
Narasi	<p>Sistem ini membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah dan koordinasi dengan instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian pemungutan pendapatan daerah.</p> <p>Berbeda dari Sistem Keuangan, sistem ini membantu Eksekutif Daerah untuk secara cepat mengetahui potensi pendapatan Pemda dari semua sumber pendapatan yang ada guna penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah yang lebih baik lagi.</p>		
Organisasi	<input type="checkbox"/> Eksekutif Daerah. <input type="checkbox"/> Dinas Daerah (Dinas Pendapatan Daerah).		
Integrasi	<input type="checkbox"/> Blok Fungsi Pelayanan, Modul Perpajakan dan Retribusi. <input type="checkbox"/> Blok Fungsi Keuangan, Modul Sistem Kas dan Perbendaharaan.		

Info Tambahan	<input type="checkbox"/> Nama alias: MAPATDA, SIMPENDA. <input type="checkbox"/> Dasar hukum: -- UU 34/2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah; -- PP 65/2001 Tentang Pajak Daerah dan PP 66/2001 Tentang Retribusi Daerah; -- Perda No. 1/2003; -- Perda No.7/2001; -- Perda No. 11/2002; -- Perda No.14/2002. <input type="checkbox"/> Rekomendasi: --
---------------	--

7.1.4 Modul PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH

Modul	PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA
Sub-Blok Fungsi	KEPEMERINTAHAN
Klasifikasi	Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office <input checked="" type="checkbox"/> Back Office Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran <input checked="" type="checkbox"/> Administrasi <input type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C
Fungsi	<input type="checkbox"/> Mengidentifikasi dan menginventarisasi semua perusahaan daerah, termasuk RSUD. <input type="checkbox"/> Membuat sistem informasi perusahaan daerah yang meliputi: jenis usaha, info pimpinan perusahaan (direksi, komisaris), laporan keuangan (rugi-laba), usaha unggulan, dan lain-lain.
Narasi	<p>Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai perusahaan daerah, maka keberadaan dan operasional perusahaan daerah tersebut, terutama kinerja keuangannya perlu dimonitor. Sistem ini menyajikan informasi penting dari semua perusahaan daerah, termasuk RSUD.</p> <p>Sistem ini membantu Eksekutif Daerah untuk memantau kinerja perusahaan daerah yang dimilikinya. Juga membantu memperkirakan target pendapata daerah dari sumber tersebut.</p>
Organisasi	<input type="checkbox"/> Eksekutif Daerah. <input type="checkbox"/> DPKKD.
Integrasi	<input type="checkbox"/> Blok Fungsi Dinas dan Lembaga, Modul Industri dan Perdagangan.
Info Tambahan	<input type="checkbox"/> Nama alias: SIM Perusahaan Daerah. <input type="checkbox"/> Dasar hukum: -- <input type="checkbox"/> Rekomendasi: --

7.2. Sub-blok Fungsi KEWILAYAHAN

Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA
Sub-Blok Fungsi	KEWILAYAHAN
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Menyediakan fungsi pengelolaan urusan pemerintahan daerah, yang dilaksanakan oleh badan dan lembaga teknis daerah, yang layanan utama fungsi tersebut adalah berkaitan dengan kewilayahan, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ○ Menyediakan fungsi perencanaan dan pengawasan (monitoring) tataruang dan lingkungan hidup; ○ Menyediakan fungsi pengelolaan, pengolahan dan pemanfaatan potensi daerah dari sektor unggulan daerah. ❑ Menyediakan fungsi pengelolaan sektor unggulan yang mendukung potensi daerah, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ○ Bidang Perdagangan; ○ Bidang Pendidikan; ○ Bidang Kepariwisataaan; ○ Bidang Kesehatan; ○ Bidang Industri Kecil dan Menengah.
Modul	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Tata Ruang dan Lingkungan Hidup. ❑ Potensi Daerah. ❑ Pertanian, Peternakan dan Perkebunan. ❑ Perikanan. ❑ Kepariwisataaan. ❑ Industri Kecil dan Menengah.
Integrasi	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Blok Fungsi Legislasi, Modul Peraturan/Perundang-undangan. ❑ Blok Fungsi Pelayanan, Modul Bisnis dan investasi. ❑ Blok Fungsi Pelayanan, Modul Pendaftaran dan Perijinan.

7.2.1. Modul TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP

Modul	TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA
Sub-Blok Fungsi	KEWILAYAHAN
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input checked="" type="checkbox"/> Front Office <input type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p> <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p> <input type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input type="checkbox"/> G2G <input checked="" type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Melakukan pendataan/inventarisasi pertanahan, tataguna tanah dan kepemilikan tanah: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pemetaan wilayah pertanahan pemerintah daerah. <input type="checkbox"/> Pembuatan peta tematik peruntukan tanah/lahan sesuai dengan rencana umum tata ruang, misalnya daerah pemukiman, daerah resapan, daerah hutan, persawahan, dan lain-lain. <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi pengelolaan basis data pertanahan. <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi yang memudahkan perencanaan tataruang dan pengalokasian fungsi lahan berdasarkan data dari peta GIS yang akurat. <input type="checkbox"/> Menyediakan sistem informasi lingkungan hidup, berdasarkan peta tematik tata ruang, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memelihara agar lingkungan hidup dapat dijaga kelestariannya dari hal-hal yang tidak semestinya, misalnya daerah resapan air tidak boleh untuk perumahan, dan lain-lain.
Narasi	<p>Sistem tataruang dan lingkungan hidup memberikan informasi ke pemerintah daerah dan masyarakat umum, peruntukan tataguna lahan dari suatu wilayah, misalnya sebagai daerah resapan air, daerah pemukiman penduduk, dan lain-lain.</p> <p>Dengan bantuan sistem informasi geografis, maka informasi dapat disajikan dengan lebih akurat dan lebih nyata, sehingga memudahkan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan menerbitkan perijinan yang lebih sesuai dengan rencana umum tataruang, dan kerusakan lingkungan dapat diminimalisir sebanyak mungkin.</p>
Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Dinas daerah (dinas tataruang, dinas lingkungan hidup). <input type="checkbox"/> Lembaga / instansi terkait.
Integrasi	<input type="checkbox"/> Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan.
Info Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nama alias: SIM Tata Ruang. <input type="checkbox"/> Dasar hukum: -- UU No.26/2007; -- Perda No.22/2001. <input type="checkbox"/> Rekomendasi: membangun sistem tataruang dan lingkungan hidup dengan mengikutsertakan sistem pemetaan (GIS) sehingga memudahkan pengguna dalam memanfaatkan sistem ini secara optimal.

7.2.2. Modul POTENSI DAERAH

Modul	POTENSI DAERAH
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA
Sub-Blok Fungsi	KEWILAYAHAN
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input checked="" type="checkbox"/> Front Office <input type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p> <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p> <input type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input type="checkbox"/> G2G <input checked="" type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<p><input type="checkbox"/> Melakukan pendataan/inventarisasi sumber-sumber potensi daerah, yang menjadi sektor unggulan daerah, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Bidang Perdagangan; o Bidang Pendidikan; o Bidang Kepariwisata; o Bidang Kesehatan; o Bidang Industri Kecil dan Menengah. <p><input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi pengelolaan basis data potensi daerah.</p> <p><input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi perencanaan dan/atau pemanfaatan potensi daerah dalam program pembangunan daerah.</p> <p><input type="checkbox"/> Menyajikan/merepresentasikan potensi daerah dalam peta tematik.</p>
Narasi	<p>Sistem ini membantu Pemerintah Daerah mempromosikan semua potensi daerah yang menjadi unggulan daerahnya masing-masing kepada publik dan kalangan bisnis. Diharapkan informasi ini mampu menarik minat kalangan bisnis untuk menanamkan modal dan melakukan kegiatan usaha di bidang tersebut. Selain itu, juga diharapkan dapat menarik minat wisatawan.</p> <p>Oleh karena itu, info potensi daerah harus didukung dengan informasi pendukung lain yang lengkap dan memadai seperti: peraturan perundang-undangan yang berhubungan, info syarat dan prosedur investasi, pendaftaran dan perijinan usaha.</p>
Organisasi	<p><input type="checkbox"/> Dinas Daerah.</p> <p><input type="checkbox"/> Lembaga Teknis Daerah.</p>
Integrasi	<p><input type="checkbox"/> Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan.</p> <p><input type="checkbox"/> Blok Fungsi Legislasi, Modul Katalog Hukum, Peraturan dan Perundang-undangan.</p> <p><input type="checkbox"/> Blok Fungsi, Pelayanan, Modul Bisnis dan Investasi.</p> <p><input type="checkbox"/> Blok Fungsi Pelayanan, Modul Pendaftaran dan Perijinan .</p>
Info Tambahan	<p><input type="checkbox"/> Nama alias: SIMPOTENDA, SIMPROMODA, GIS-SIMPOTENDA.</p> <p><input type="checkbox"/> Dasar hukum: --</p> <p><input type="checkbox"/> Rekomendasi: membangun sistem informasi potensi daerah dalam satu sinergi dengan dinas/instansi terkait, terutama dengan organisasi pengelola/penanggung-jawab dari sektor unggulan daerah.</p>

7.2.3. Modul PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN

Modul	PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN		
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA		
Sub-Blok Fungsi	KEWILAYAHAN		
Klasifikasi	Jenis Layanan	<input type="checkbox"/> Front Office	<input checked="" type="checkbox"/> Back Office
	Layanan Utama	<input type="checkbox"/> Publikasi Informasi	<input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan
		<input type="checkbox"/> Transaksi Data	<input type="checkbox"/> Pembayaran
	Fungsi Aplikasi	<input type="checkbox"/> Administrasi	<input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input checked="" type="checkbox"/> Lainnya
		<input type="checkbox"/> Generik	<input checked="" type="checkbox"/> Spesifik
	Obyek Layanan	<input checked="" type="checkbox"/> G2G	<input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C
Fungsi	<input type="checkbox"/> Melakukan pendataan/inventarisasi sumber-sumber potensi daerah, terutama di sektor Pertanian dan Perkebunan, termasuk didalamnya antara lain: <ul style="list-style-type: none"> o Pemetaan wilayah pertanian dan perkebunan (raw data); o Pembuatan peta penggunaan tanah untuk pertanian dan perkebunan, misalnya berdasarkan jenis tanaman komoditi, daerah, luas areal, ketinggian, curah hujan, tekstur tanah, iklim, cuaca, dan lain-lain; o Pemetaan jaringan irigasi dan tataguna air (jaringan irigasi yang sudah ada dan yang sedang atau akan dibangun). <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi pengelolaan basis data pertanian dan perkebunan <input type="checkbox"/> Menyediakan sistem informasi pertanian dan perkebunan, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> o Membentuk jaringan informasi pertanian dan perkebunan antara dinas pertanian, usaha tani serta masyarakat; o Inventarisasi usaha pengolahan hasil pertanian dan perkebunan dan produk unggulan lainnya, dan pasar usaha pengolahan pertanian dan perkebunan; o Menjembatani antara usaha tani, pasar hasil pertanian, usaha alat-alat pertanian, serta hasil-hasil penelitian bidang pertanian. 		
Narasi	<p>Sistem ini lebih menekankan pada pengolahan dan pengelolaan data dan informasi pertanian dan perkebunan, dan menyediakan layanan baik administratif maupun teknis, yang mendukung fungsi dari organisasi pengelolaanya.</p> <p>Setiap informasi tentang program dan teknis pembangunan dan pengembangan pertanian dan perkebunan dapat diperoleh pada aplikasi ini. Para petani dapat mengetahui harga dasar hasil pertanian dan perkebunan serta standar teknis pengadaan dan distribusi hasil pertanian dan perkebunan tersebut. Pemerintah dapat membuat analisa rawan pangan, neraca bahan makanan, produksi pertanian dan perkebunan, dan sebagainya.</p> <p>Aplikasi ini lebih bersifat back office. Sebagian informasi yang perlu disampaikan ke publik disajikan melalui sistem informasi potensi daerah.</p>		
Organisasi	<input type="checkbox"/> Dinas Daerah. <input type="checkbox"/> Lembaga Teknis Daerah.		
Integrasi	<input type="checkbox"/> Blok Fungsi Dinas & Lembaga, Sub-Blok Fungsi Kewilayahan, Modul Potensi Daerah.		
Info Tambahan	<input type="checkbox"/> Nama alias: SIM Pertanian, SIM Perkebunan. <input type="checkbox"/> Dasar hukum: -- <input type="checkbox"/> Rekomendasi: membangun sistem informasi pertanian dan perkebunan dalam satu sinergi dengan dinas/instansi terkait, terutama dengan pengelola sistem informasi potensi daerah.		

7.2.4. Modul PERIKANAN

Modul	PERIKANAN
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA
Sub-Blok Fungsi	KEWILAYAHAN
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office <input checked="" type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p> <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p> <input type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input checked="" type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<p><input type="checkbox"/> Melakukan pendataan/inventarisasi sumber-sumber potensi daerah, terutama di sektor perikanan darat, termasuk didalamnya antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Pemetaan wilayah perikanan (raw data); o Pembuatan peta penggunaan lahan untuk perikanan, misalnya berdasarkan daerah, jenis ikan / komoditi, luas areal, dan lain-lain. <p><input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi pengelolaan basis data perikanan.</p> <p><input type="checkbox"/> Menyediakan sistem informasi perikanan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Membentuk jaringan informasi perikanan seperti jenis komoditi, jumlah tangkapan, daerah tangkapan; o Inventarisasi usaha dan pasar usaha perikanan.
Narasi	<p>Sistem ini lebih menekankan pada pengolahan dan pengelolaan data dan informasi perikanan, dan menyediakan layanan baik administratif maupun teknis, yang mendukung fungsi dari organisasi pengelolanya.</p> <p>Sistem ini membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi potensi sumber daya perikanan, serta hal-hal lain yang berkaitan, termasuk didalamnya potensi investasi dan bisnis di bidang perikanan.</p> <p>Aplikasi ini lebih bersifat back office. Sebagian informasi yang perlu disampaikan ke publik disajikan melalui sistem informasi potensi daerah.</p>
Organisasi	<p><input type="checkbox"/> Dinas Daerah.</p> <p><input type="checkbox"/> Lembaga Teknis Daerah.</p>
Integrasi	<input type="checkbox"/> Blok Fungsi Dinas & Lembaga, Sub-Blok Fungsi Kewilayahan, Modul Potensi Daerah.
Info Tambahan	<p><input type="checkbox"/> Nama alias: SIM Perikanan.</p> <p><input type="checkbox"/> Dasar hukum: --</p> <p><input type="checkbox"/> Rekomendasi: membangun sistem informasi perikanan dalam satu sinergi dengan dinas/instansi terkait, terutama dengan pengelola sistem informasi potensi daerah.</p>

7.2.5. Modul PARIWISATA

Modul	PARIWISATA
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA
Sub-Blok Fungsi	KEWILAYAHAN
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office <input checked="" type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p><input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p>Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input checked="" type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Obyek Layanan <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Melakukan pendataan/inventarisasi sumber-sumber potensi daerah, terutama di sektor Pariwisata, termasuk didalamnya antara lain: <ul style="list-style-type: none"> o Pemetaan wilayah pariwisata (raw data); o Pembuatan peta tematik daerah wisata dan sebarannya berdasarkan jenis obyek wisata (wisata gunung/tebing, kebun atau wisata lainnya), lokasi obyek wisata, dan lain-lain; o Pembuatan peta tematik sarana dan prasarana wisata meliputi hotel, restoran, tempat ibadah, spbu, tempat belanja, bank, dan lain-lain (site map wisata). <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi pengelolaan basis data pariwisata. <input type="checkbox"/> Menyediakan sistem informasi pariwisata, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> o Jenis dan deskripsi obyek wisata, letak daerahnya, transportasi menuju ke obyek tersebut, program wisata, dan lain-lain; o Sarana dan prasarana wisata meliputi hotel, restoran, tempat ibadah, spbu, tempat belanja, bank, dan lain-lain. <input type="checkbox"/> Menyediakan sistem aplikasi kepariwisataan, meliputi <ul style="list-style-type: none"> o Administrasi pengunjung (tiket masuk, retribusi, statistik pengunjung, dll); o Sistem layanan wisata (pemesanan tiket, koordinasi dengan biro perjalanan/biro wisata, koordinasi dengan sistem perhotelan, dsb); o Pembukuan, administrasi umum, keuangan dan akuntansi (untuk pengelolaan tiap obyek wisata daerah).
Narasi	<p>Sistem ini lebih menekankan pada pengolahan dan pengelolaan data dan informasi kepariwisataan, dan menyediakan layanan baik administratif maupun teknis, yang mendukung fungsi dari organisasi pengelolaanya.</p> <p>Sistem ini menyediakan fungsi pengelolaan pariwisata daerah, dimulai dari promosinya, manajemen pelayanan wisata (sistem pemesanan tiket, koordinasi dengan perhotelan, biro wisata, dll), pengelolaan obyek wisata dll. Sistem ini akan membantu Pemerintah Daerah untuk melakukan inventarisasi data, perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan dan pengawasan potensi dan usaha bidang pariwisata daerah.</p> <p>Aplikasi ini lebih bersifat back office. Sebagian informasi yang perlu disampaikan ke publik disajikan melalui sistem informasi potensi daerah.</p>
Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Dinas Daerah. <input type="checkbox"/> Lembaga Teknis Daerah.
Integrasi	<input type="checkbox"/> Blok Fungsi Dinas & Lembaga, Sub-Blok Fungsi Kewilayahan, Modul Potensi Daerah.
Info Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nama alias: SIMPAR, SIM Pariwisata. <input type="checkbox"/> Dasar hukum: -- <input type="checkbox"/> Rekomendasi: membangun sistem informasi kepariwisataan dalam satu sinergi dengan dinas/instansi terkait, terutama dengan pengelola sistem informasi potensi daerah.

7.2.6. Modul IKM

Modul	INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM)		
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA		
Sub-Blok Fungsi	KEWILAYAHAN		
Klasifikasi	Jenis Layanan	<input type="checkbox"/> Front Office	<input checked="" type="checkbox"/> Back Office
	Layanan Utama	<input type="checkbox"/> Publikasi Informasi	<input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan
		<input type="checkbox"/> Transaksi Data	<input type="checkbox"/> Pembayaran
		<input type="checkbox"/> Administrasi	<input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input checked="" type="checkbox"/> Lainnya
	Fungsi Aplikasi	<input type="checkbox"/> Generik	<input checked="" type="checkbox"/> Spesifik
	Obyek Layanan	<input checked="" type="checkbox"/> G2G	<input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C
Fungsi	<input type="checkbox"/> Melakukan pendataan/inventarisasi sumber-sumber potensi daerah, terutama di sektor IKM, termasuk didalamnya koperasi. <input type="checkbox"/> Mendokumentasikan (basis data) kegiatan koperasi dan ikm, meliputi jenis bidang usaha, modal/klasifikasi, jumlah pegawai, jenis kegiatan, dan lain-lain. <input type="checkbox"/> Mendokumentasikan (basis data) lembaga lain terkait seperti bank, koperasi simpan pinjam, BPR, BPRS serta lembaga kemitraan lain seperti Asosiasi Perdagangan, Asosiasi Pengusaha, BUMN, BUMD, BUMS, dan sebagainya. <input type="checkbox"/> Menyediakan sistem informasi koperasi dan ikm kepada organisasi pengelola / instansi terkait untuk kemudahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan.		
Narasi	<p>Sistem ini lebih menekankan pada pengolahan dan pengelolaan data dan informasi ikm (termasuk koperasi), dan menyediakan layanan baik administratif maupun teknis, yang mendukung fungsi dari organisasi pengelolanya.</p> <p>Sistem ini akan membantu Pemerintah Daerah dalam memantau dan mengevaluasi kegiatan koperasi dan IKM serta memberikan pembinaan untuk peningkatan SDM, bantuan modal dan peningkatan usaha. Juga mempermudah pelaksanaan program kemitraan antara sektor real, regulator dan lembaga keuangan.</p> <p>Aplikasi ini lebih bersifat back office. Sebagian informasi yang perlu disampaikan ke publik disajikan melalui sistem informasi potensi daerah.</p>		
Organisasi	<input type="checkbox"/> Dinas Daerah. <input type="checkbox"/> Lembaga Teknis Daerah.		
Integrasi	<input type="checkbox"/> Blok Fungsi Dinas & Lembaga, Sub-Blok Fungsi Kewilayahan, Modul Potensi Daerah.		
Info Tambahan	<input type="checkbox"/> Nama alias: SIM IKM, SIM UKM. <input type="checkbox"/> Dasar hukum: -- <input type="checkbox"/> Rekomendasi: membangun sistem informasi industri kecil dan menengah dalam satu sinergi dengan dinas/instansi terkait, terutama dengan pengelola sistem informasi potensi daerah.		

7.3. Sub-Blok Fungsi KEMASYARAKATAN

UU 32/2004 pasal 167 mengamanatkan agar belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Beberapa kewajiban daerah yang berhubungan dengan fungsi pelayanan kepada penduduknya diantaranya adalah: peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta pengembangan sistem jaminan sosial.

Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA
Sub-Blok Fungsi	KEMASYARAKATAN
Fungsi	<input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi pengelolaan urusan pemerintahan, terutama yang dikerjakan oleh dinas dan lembaga pemerintah, yang orientasi fungsinya berkaitan dengan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
Modul	<input type="checkbox"/> Kesehatan. <input type="checkbox"/> Pendidikan. <input type="checkbox"/> Ketenagakerjaan . <input type="checkbox"/> Industri dan Perdagangan. <input type="checkbox"/> Jaring Pengaman Sosial.
Integrasi	Blok Fungsi Pelayanan.

7.3.1. Modul KESEHATAN

Modul	KESEHATAN																								
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA																								
Sub-Blok Fungsi	KEMASYARAKATAN																								
Klasifikasi	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">Jenis Layanan</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Front Office</td> <td><input type="checkbox"/> Back Office</td> </tr> <tr> <td>Layanan Utama</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi</td> <td><input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/> Transaksi Data</td> <td><input type="checkbox"/> Pembayaran</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/> Administrasi</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Basis Data</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/> Lainnya</td> </tr> <tr> <td>Fungsi Aplikasi</td> <td><input type="checkbox"/> Generik</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Spesifik</td> </tr> <tr> <td>Obyek Layanan</td> <td><input type="checkbox"/> G2G</td> <td><input type="checkbox"/> G2B</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> G2C</td> </tr> </table>	Jenis Layanan	<input checked="" type="checkbox"/> Front Office	<input type="checkbox"/> Back Office	Layanan Utama	<input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi	<input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan		<input type="checkbox"/> Transaksi Data	<input type="checkbox"/> Pembayaran		<input type="checkbox"/> Administrasi	<input checked="" type="checkbox"/> Basis Data			<input type="checkbox"/> Lainnya	Fungsi Aplikasi	<input type="checkbox"/> Generik	<input checked="" type="checkbox"/> Spesifik	Obyek Layanan	<input type="checkbox"/> G2G	<input type="checkbox"/> G2B			<input checked="" type="checkbox"/> G2C
Jenis Layanan	<input checked="" type="checkbox"/> Front Office	<input type="checkbox"/> Back Office																							
Layanan Utama	<input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi	<input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan																							
	<input type="checkbox"/> Transaksi Data	<input type="checkbox"/> Pembayaran																							
	<input type="checkbox"/> Administrasi	<input checked="" type="checkbox"/> Basis Data																							
		<input type="checkbox"/> Lainnya																							
Fungsi Aplikasi	<input type="checkbox"/> Generik	<input checked="" type="checkbox"/> Spesifik																							
Obyek Layanan	<input type="checkbox"/> G2G	<input type="checkbox"/> G2B																							
		<input checked="" type="checkbox"/> G2C																							
Fungsi	<input type="checkbox"/> Publikasi informasi kesehatan kepada masyarakat meliputi: nama dan tempat lokasi rumah sakit dan puskesmas, fasilitas dan layanannya polikliniknya, laboratorium, apotek, dan lain-lain. <input type="checkbox"/> Perencanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> o Menginventarisir kebutuhan pelayanan kesehatan dari tiap wilayah; o Menyusun rencana kegiatan pelayan kesehatan masyarakat, misalnya melalui rumah sakit, balai kesehatan ibu dan anak, posyandu, klinik, praktek dokter, bidan, dokter gigi, ahli khitan, optik, laboratorium kesehatan dan sebagainya. 																								
Narasi	<p>Sistem ini mempunyai dua fungsi: ke masyarakat dan internal Pemda. Melalui sistem ini masyarakat dapat mengetahui informasi sekitar fasilitas kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi nama dan tempat lokasi rumah sakit dan puskesmas, kelas layanan, rincian layanan apa saja yang disediakan, dan lain-lain sehingga memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan tersebut.</p> <p>Untuk internal Pemda, sistem ini disamping memberikan data nama dan tempat lokasi, juga memberikan status fasilitas kesehatan tersebut, sarana dan prasarana pendukung, status aktivitas kegiatan, statistik penyakit, dan lain-lain sehingga dalam menyusun kebijakan dan program erja di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dapat lebih fokus dan tepat sasaran.</p>																								
Organisasi	<input type="checkbox"/> Dinas Daerah (Dinas Kesehatan). <input type="checkbox"/> Lembaga / instansi terkait (rumah sakit / puskesmas).																								

Integrasi	<input type="checkbox"/> Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Pemerintahan.
Info Tambahan	<input type="checkbox"/> Nama alias: SIMKES. <input type="checkbox"/> Dasar hukum: -- <input type="checkbox"/> Rekomendasi: --

7.3.2. Modul pendidikan

Modul	PENDIDIKAN																				
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA																				
Sub-Blok Fungsi	KEMASYARAKATAN																				
Klasifikasi	<table border="0"> <tr> <td>Jenis Layanan</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Front Office</td> <td><input type="checkbox"/> Back Office</td> </tr> <tr> <td>Layanan Utama</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi</td> <td><input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/> Transaksi Data</td> <td><input type="checkbox"/> Pembayaran</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/> Administrasi</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Basis Data</td> <td><input type="checkbox"/> Lainnya</td> </tr> <tr> <td>Fungsi Aplikasi</td> <td><input type="checkbox"/> Generik</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Spesifik</td> </tr> <tr> <td>Obyek Layanan</td> <td><input type="checkbox"/> G2G</td> <td><input type="checkbox"/> G2B</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> G2C</td> </tr> </table>	Jenis Layanan	<input checked="" type="checkbox"/> Front Office	<input type="checkbox"/> Back Office	Layanan Utama	<input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi	<input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan		<input type="checkbox"/> Transaksi Data	<input type="checkbox"/> Pembayaran		<input type="checkbox"/> Administrasi	<input checked="" type="checkbox"/> Basis Data	<input type="checkbox"/> Lainnya	Fungsi Aplikasi	<input type="checkbox"/> Generik	<input checked="" type="checkbox"/> Spesifik	Obyek Layanan	<input type="checkbox"/> G2G	<input type="checkbox"/> G2B	<input checked="" type="checkbox"/> G2C
Jenis Layanan	<input checked="" type="checkbox"/> Front Office	<input type="checkbox"/> Back Office																			
Layanan Utama	<input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi	<input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan																			
	<input type="checkbox"/> Transaksi Data	<input type="checkbox"/> Pembayaran																			
	<input type="checkbox"/> Administrasi	<input checked="" type="checkbox"/> Basis Data	<input type="checkbox"/> Lainnya																		
Fungsi Aplikasi	<input type="checkbox"/> Generik	<input checked="" type="checkbox"/> Spesifik																			
Obyek Layanan	<input type="checkbox"/> G2G	<input type="checkbox"/> G2B	<input checked="" type="checkbox"/> G2C																		
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Menyediakan informasi pendidikan, dari mulai pendidikan pra-sekolah, taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan seterusnya sampai universitas / perguruan tinggi, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> o Info sekolah dan alamatnya; o Profile sekolah, info kurikulum, tenaga pendidikan, fasilitas belajar-mengajar, status sekolah, akreditasi, daya tampung murid, jumlah murid sekarang, dan lain-lain; o Program kegiatan dan agenda sekolah, termasuk jadwal penerimaan murid baru, jadwal ujian, kelulusan, dan lain-lain. <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi untuk membantu proses akreditasi sekolah, sesuai dengan sistem akreditasi nasional. <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi pelaporan untuk kepentingan Pemerintah Daerah meliputi status sekolah, daya tampung murid, jumlah murid sekarang, dan lain-lain. <input type="checkbox"/> Menyediakan jaringan sistem informasi kependidikan terintegrasi tentang data-data pokok kependidikan, dari mulai pendidikan pra-sekolah sampai perguruan tinggi. <ul style="list-style-type: none"> o Data pokok kependidikan yang dimaksud adalah minimum data yang dibutuhkan dari suatu sekolah, seperti: jumlah kelas, jumlah murid, jumlah pengajar, acuan kurikulum, dan lain-lain; o Data pokok kependidikan bisa saling dipertukarkan antara satu institusi pendidikan dengan lainnya, bahkan dengan pihak Pemda. 																				
Narasi	<p>Melalui sistem ini masyarakat dapat mengetahui informasi sekitar pendidikan, dari mulai pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Juga tentang ketersediaan dan sebaran sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang ada. Melalui sistem informasi kependidikan dapat diketahui dengan mudah informasi sekolah, daya tampung, lokasi, nilai masuk terendah dan tertinggi, profil sekolah, dan lain-lain.</p> <p>Untuk kepentingan Pemda, sistem ini memberikan status fasilitas pendidikan, daya tampung, jumlah murid, distribusi / sebaran fasilitas pendidikan (dibanding dengan sebaran penduduk usia sekolah), dan lain-lain sehingga dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan bidang pendidikan, dapat lebih fokus, tepat sasaran dan berdaya guna.</p>																				
Organisasi	<input type="checkbox"/> Dinas Daerah (Dinas Pendidikan). <input type="checkbox"/> Lembaga / instansi terkait (institusi sekolah).																				
Integrasi	<input type="checkbox"/> Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Pemerintahan.																				
Info Tambahan	<input type="checkbox"/> Nama alias: SIMDIKDA. <input type="checkbox"/> Dasar hukum: -- <input type="checkbox"/> Rekomendasi: --																				

7.3.3. Modul KETENAGAKERJAAN

Modul	KETENAGAKERJAAN		
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA		
Sub-Blok Fungsi	KEMASYARAKATAN		
Klasifikasi	Jenis Layanan	<input checked="" type="checkbox"/> Front Office	<input type="checkbox"/> Back Office
	Layanan Utama	<input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi	<input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan
		<input type="checkbox"/> Transaksi Data	<input type="checkbox"/> Pembayaran
	Fungsi Aplikasi	<input type="checkbox"/> Administrasi	<input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya
		<input type="checkbox"/> Generik	<input checked="" type="checkbox"/> Spesifik
	Obyek Layanan	<input type="checkbox"/> G2G	<input type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Memberikan informasi lowongan pekerjaan kepada masyarakat luas, meliputi: instansi / lembaga / perusahaan yang membutuhkan, syarat pendaftaran, kualifikasi yang dibutuhkan, dan lain-lain. <input type="checkbox"/> Memfasilitasi masyarakat yang ingin mencari pekerjaan (pengurusan kartu kuning). <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi pengumuman pekerjaan dan administrasi berkaitan dengan pengurusan pekerjaan on-line, menyediakan fungsi call-center untuk pelayanan tersebut (atau melalui e-mail, atau sistem elektronik lain) <input type="checkbox"/> Memberikan informasi tentang balai latihan kerja (dan fasilitas pelatihan lain) yang disediakan pemerintah yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, meliputi standar kompetensi yang dibentuk, syarat dan waktu pendaftaran, tempat pelatihan, tempat magang, dan lain-lain. <input type="checkbox"/> Memberikan informasi umum tentang ketenaga-kerjaan, seperti: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Sistem upah dan standarisasi besaran upah menurut peraturan yang berlaku; <input type="checkbox"/> Sistem keselamatan kerja, beserta uraiannya untuk setiap jenis pekerjaan yang umum seperti konstruksi, industri dan lain-lain; <input type="checkbox"/> Sistem jaminan sosial dan suransi tenaga kerja, sistem pensiun dan penjaminan hari tua, program apa saja yang bisa diikuti, instansi / lembaga penyelenggaranya siapa saja, dan lain-lain. 		
Narasi	<p>Sistem ini membantu Pemerintah Daerah khususnya dalam memberikan pelayanan informasi ketenagakerjaan. Melalui publikasi informasi (yang terintegrasi dengan lembaga/instansi pemda, dunia industri dan perusahaan penyedia lapangan kerja) pemerintah dapat memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan informasi pekerjaan seperti: lowongan pekerjaan, syarat pendaftaran, spesifikasi keahlian, dan lain-lain.</p> <p>Melalui aplikasi ini, pemerintah juga bisa menyebarluaskan informasi tentang balai latihan kerja dan program pelatihannya yang dapat diikuti oleh masyarakat, standar kompetensi apa saja yang bisa disediakan, dimana tempat magangnya, dan lain-lain.</p>		
Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Dinas Daerah (Dinas Tenaga Kerja). <input type="checkbox"/> Lembaga / instansi terkait. 		
Integrasi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan. <input type="checkbox"/> Blok Fungsi Dinas dan Lembaga, Modul Industri dan Perdagangan. 		
Info Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nama alias: SIMNAKER. <input type="checkbox"/> Dasar hukum: -- <input type="checkbox"/> Rekomendasi: -- 		

7.3.4. Modul INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

Modul	INDUSTRI DAN PERDAGANGAN		
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA		
Sub-Blok Fungsi	KEMASYARAKATAN		
Klasifikasi	Jenis Layanan	<input checked="" type="checkbox"/> Front Office	<input type="checkbox"/> Back Office
	Layanan Utama	<input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi	<input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan
		<input type="checkbox"/> Transaksi Data	<input type="checkbox"/> Pembayaran
		<input type="checkbox"/> Administrasi	<input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya
	Fungsi Aplikasi	<input type="checkbox"/> Generik	<input checked="" type="checkbox"/> Spesifik
	Obyek Layanan	<input type="checkbox"/> G2G	<input type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C
Fungsi	<input type="checkbox"/> Membentuk jaringan sistem informasi perindustrian (termasuk IKM, perusahaan daerah dan koperasi) dan menyediakan informasi umum tentang hal tersebut kepada masyarakat seperti: nama badan usaha, lokasi, bidang usaha, produk unggulan, profile perusahaan, dan lain-lain. <input type="checkbox"/> Membentuk jaringan sistem informasi perdagangan, meliputi kegiatan ekspor-import, perdagangan barang dan jasa, pasar modal, dan jenis kegiatan transaksi perdagangan lainnya. Memberikan informasi tentang hal tersebut kepada masyarakat seperti: info kurs/valuta, indeks saham, harga sembako, komoditi unggulan, dan lain-lain. <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi komunikasi data lowongan kerja dengan sistem ketenagakerjaan dari dinas/instansi terkait dengan format data yang distandarisasi, mencakup: perusahaan yang membutuhkan, syarat dan waktu pendaftaran, kualifikasi yang dibutuhkan, jadwal test, pengumuman, dan lain-lain. <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi konsultasi bagi para masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan pengetahuan / konsultasi bisnis / pembinaan usaha IKM melalui media elektronik seperti: rubrik / kolom berita, tanya jawab lewat e-mail, mailing list, forum rembug dan diskusi lewat internet, dan lain-lain.		
Narasi	<p>Sistem industri dan perdagangan dibangun oleh Pemerintah Daerah terutama untuk memfasilitasi masyarakat akan kebutuhan layanan informasi industri dan perdagangan, misalnya info lowongan kerja, info harga bahan pokok, info pasar saham, dan lain-lain.</p> <p>Disamping itu juga sebagai sara Pemerintah Daerah dalam upayanya untuk memberdayakan masyarakat, terutama peningkatan pengetahuan dan ketrampilan di bidang industri, perdagangan, koperasi dan IKM. Salah satu medianya adalah dengan memberikan fasilitas konsultasi on-line melalui internet, surat elektronik, forum, dan lain-lain.</p>		
Organisasi	<input type="checkbox"/> Dinas Daerah (Dinas Industri dan Perdagangan). <input type="checkbox"/> Lembaga / instansi terkait.		
Integrasi	<input type="checkbox"/> Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan. <input type="checkbox"/> Blok Fungsi Dinas dan Lembaga, Modul Ketenagakerjaan.		
Info Tambahan	<input type="checkbox"/> Nama alias: SIMINDAG. <input type="checkbox"/> Dasar hukum: -- <input type="checkbox"/> Rekomendasi: --		

7.3.5. Modul JARING PENGAMAN SOSIAL

Modul	JARING PENGAMAN SOSIAL		
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA		
Sub-Blok Fungsi	KEMASYARAKATAN		
Klasifikasi	Jenis Layanan	<input checked="" type="checkbox"/> Front Office	<input type="checkbox"/> Back Office
	Layanan Utama	<input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi	<input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan
		<input type="checkbox"/> Transaksi Data	<input type="checkbox"/> Pembayaran
		<input type="checkbox"/> Administrasi	<input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya
	Fungsi Aplikasi	<input type="checkbox"/> Generik	<input checked="" type="checkbox"/> Spesifik
	Obyek Layanan	<input type="checkbox"/> G2G	<input type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C
Fungsi	<input type="checkbox"/> Membentuk jaringan sistem informasi sosial, berkoordinasi dan bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat dan lembaga sosial lainnya, melakukan inventarisasi masalah sosial, anak gelandangan, anak jalanan, anak terlantar, dan lain-lain. <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi analisa masalah (dengan mendapatkan masukan data dari sistem lain), memberikan bantuan dalam penentuan solusi masalah kesejahteraan sosial, seperti program rumah singgah, program pemberdayaan anak jalanan, program sekolah khusus anak terlantar, dan lain-lain. <input type="checkbox"/> Memberikan informasi kepada masyarakat tentang potensi timbulnya masalah kesejahteraan sosial dan tatacara / prosedur penanggulangannya. Beberapa masalah yang dibahas terutama yang menyangkut kebutuhan dasar seperti: pengangguran (kehilangan pekerjaan), kekurangan makanan, obat-obatan, air bersih, dan lain-lain. Termasuk didalamnya tentang tatacara permohonan bantuan untuk bencana alam, kebakaran, phk massal (penutupan perusahaan), dan lain-lain. <input type="checkbox"/> Menetapkan indikator dan menyediakan fungsi yang memungkinkan dilaksanakannya monitoring pelaksanaan dan evaluasi hasil program kerja kesejahteraan sosial oleh pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat dan pihak-pihak lain yang berhubungan.		
Narasi	<p>Informasi yang cepat dan akurat tentang masalah kesejahteraan sangat penting dan dibutuhkan terutama menyangkut masalah koordinasi antar instansi/lembaga terkait, juga dengan pihak lain dalam hal pelaksanaan program kesejahteraan sosial. Sering masyarakat yang ditimpa musibah terlambat mendapatkan pertolongan disebabkan tidak adanya / atau terlambatnya data yang masuk ke Pemerintah dan institusi sosial lainnya.</p> <p>Disisi lain juga terjadi adanya tumpang tindih program bantuan sosial dikarenakan data yang tidak akurat, seperti program beras untuk rakyat miskin (raskin) yang tidak tepat sasaran, distribusi bantuan (untuk masyarakat yang kena musibah) yang tidak merata, dan lain-lain.</p> <p>Dengan sistem ini diharapkan tidak terjadi lagi masalah tersebut diatas, karena setiap kegiatan kesejahteraan sosial bisa dikoordinasikan dan diawasi dengan baik.</p>		
Pengguna (Organisasi)	<input type="checkbox"/> Dinas Daerah. <input type="checkbox"/> Lembaga / instansi terkait.		
Integrasi	<input type="checkbox"/> Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan.		
Info Tambahan	<input type="checkbox"/> Nama alias: SIM JPS. <input type="checkbox"/> Dasar hukum: -- <input type="checkbox"/> Rekomendasi: --		

7.4. Sub-blok Fungsi SARANA DAN PRASARANA

Menyediakan fungsi pengelolaan urusan pemerintahan, terutama yang dikerjakan oleh dinas dan lembaga pemerintah, yang orientasi fungsinya berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana.

Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA
Sub-Blok Fungsi	SARANA DAN PRASARANA
Fungsi	<input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi pengelolaan, monitoring dan sistem informasi sarana dan prasarana perhubungan yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> o Sarana dan prasarana transportasi; o Sarana dan prasarana jalan dan jembatan; o Sarana dan prasarana terminal. <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi pengelolaan, monitoring dan sistem informasi sarana dan prasarana umum:
Modul	<input type="checkbox"/> Transportasi. <input type="checkbox"/> Jalan dan Jembatan. <input type="checkbox"/> Terminal. <input type="checkbox"/> Sarana Umum. <input type="checkbox"/> Pengawasan.
Integrasi	<input type="checkbox"/> Blok Fungsi Pelayan.

7.4.1. Modul TRANSPORTASI

Modul	TRANSPORTASI																	
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA																	
Sub-Blok Fungsi	SARANA DAN PRASARANA																	
Klasifikasi	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">Jenis Layanan</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Front Office</td> <td><input type="checkbox"/> Back Office</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Layanan Utama</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi</td> <td><input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Transaksi Data</td> <td><input type="checkbox"/> Pembayaran</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/> Administrasi</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya</td> </tr> <tr> <td>Fungsi Aplikasi</td> <td><input type="checkbox"/> Generik</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Spesifik</td> </tr> <tr> <td>Obyek Layanan</td> <td><input type="checkbox"/> G2G</td> <td><input type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C</td> </tr> </table>	Jenis Layanan	<input checked="" type="checkbox"/> Front Office	<input type="checkbox"/> Back Office	Layanan Utama	<input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi	<input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan	<input type="checkbox"/> Transaksi Data	<input type="checkbox"/> Pembayaran		<input type="checkbox"/> Administrasi	<input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya	Fungsi Aplikasi	<input type="checkbox"/> Generik	<input checked="" type="checkbox"/> Spesifik	Obyek Layanan	<input type="checkbox"/> G2G	<input type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C
Jenis Layanan	<input checked="" type="checkbox"/> Front Office	<input type="checkbox"/> Back Office																
Layanan Utama	<input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi	<input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan																
	<input type="checkbox"/> Transaksi Data	<input type="checkbox"/> Pembayaran																
	<input type="checkbox"/> Administrasi	<input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya																
Fungsi Aplikasi	<input type="checkbox"/> Generik	<input checked="" type="checkbox"/> Spesifik																
Obyek Layanan	<input type="checkbox"/> G2G	<input type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C																
Fungsi	<input type="checkbox"/> Publikasi informasi sarana dan prasarana transportasi kepada masyarakat meliputi: transportasi darat. <input type="checkbox"/> Melakukan standarisasi minimal informasi yang harus disediakan ke masyarakat berkaitan dengan kebutuhan akan sistem informasi transportasi, seperti: rute (dari dan tujuan), rute utama, rute alternatif, terminal keberangkatan dan kedatangan, jenis dan kelas kendaraan, jumlah kendaraan per rute trayek, jadwal keberangkatan dan kedatangan (tabel waktu), standar tarif (sesuai dengan jenis dan kelas kendaraan), tempat transit, informasi keselamatan dalam perjalanan, asuransi, dan lain-lain. <input type="checkbox"/> Membuat peta tematik (GIS) sistem informasi transportasi darat. Peta ini menunjukkan basis-data rute angkutan kendaraan. <input type="checkbox"/> Menginventarisasi data dan informasi sesuai dengan kebutuhan sistem informasi transportasi tersebut diatas dan mempublikasikannya ke masyarakat luas: <ul style="list-style-type: none"> o Menyediakan informasi sistem transportasi darat ke masyarakat. <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi basis data pendataan penumpang. Selanjutnya data statistik ini bisa dikategorisasikan per rute trayek per jenis dan kelas kendaraan, per tujuan, per kurun waktu tertentu (bulanan/semester) dan lain-lain.																	

Narasi	<p>Sistem informasi transportasi sangat membantu masyarakat dalam melaksanakan perjalanan darat. Dengan mudah rute suatu kendaraan dapat diketahui, kapan jam keberangkatannya, berapa harga tiketnya, dan lain-lain. Kemudahan ini juga sangat berguna bagi para wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Sistem ini merupakan sistem terintegrasi yang memberikan semua informasi dari semua jenis layanan transportasi yang ada, seperti bus, angkutan kota dan lain-lain.</p> <p>Data statistik penumpang akan sangat membantu Pemerintah Daerah dalam mengevaluasi sistem transportasi yang ada, apakah sudah mengakomodasikan kebutuhan masyarakat. Dibantu dengan data rute, maka juga mudah diketahui apakah ada tumpang tindih trayek atau sistem angkutan di satu wilayah, sementara di wilayah lain terjadi kekosongan sarana transportasi.</p>
Organisasi	<input type="checkbox"/> Dinas Daerah (Dinas Perhubungan).
Integrasi	Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Pemerintahan.
Info Tambahan	<p>Nama alias: SIM Transportasi.</p> <p>Dasar hukum: --</p> <p>Rekomendasi: --</p>

7.4.2. Modul JALAN DAN JEMBATAN

Modul	JALAN DAN JEMBATAN
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA
Sub-Blok Fungsi	SARANA DAN PRASARANA
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input checked="" type="checkbox"/> Front Office <input type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p> <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p> <input type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<p><input type="checkbox"/> Publikasi informasi sarana dan prasarana jalan dan jembatan kepada masyarakat meliputi: jalan darat.</p> <p><input type="checkbox"/> Melakukan standarisasi minimal informasi yang harus disediakan ke masyarakat berkaitan dengan kebutuhan akan sistem informasi jalan dan jembatan, seperti: kepadatan lalu lintas, perbandingan luas jalan dengan volume kendaraan, jenis dan kelas jalan (untuk jalan darat), tonase/ukuran bobot/tipe kendaraan yang boleh melintasinya, ruas jalan yang berpotensi menimbulkan kemacetan, dan lain-lain.</p> <p><input type="checkbox"/> Membuat peta tematik (GIS) sistem informasi jalan dan jembatan. Peta ini menunjukkan basis-data ruas jalan dan jembatan, memudahkan mengetahui status operasional dan kondisi fisik jalan dan jembatan di seluruh wilayah yang ada.</p> <p><input type="checkbox"/> Menginventarisasi data dan informasi sesuai dengan kebutuhan sistem informasi jalan dan jembatan tersebut diatas dan mempublikasikannya ke masyarakat luas.</p> <p><input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi yang memungkinkan monitoring penggunaan jalan dan jembatan (kepadatan lalu lintas) secara berkala, misal setiap satu jam, di tempat-tempat yang dikehendaki, dan mempublikasikannya kepada masyarakat.</p>
Narasi	<p>Sistem informasi jalan dan jembatan fungsinya menunjang kelancaran sistem transportasi, terutama transportasi darat. Pemerintah Daerah dengan mudah melakukan analisa kebutuhan jalan dan jembatan untuk menampung permintaan akan kebutuhan transportasi masyarakat. Jika ada jalan dan jembatan yang rusak (bisa karena bencana alam atau kecelakaan atau sebab lainnya), pemerintah daerah dengan cepat dapat menyiapkan rencana kontinjensi dan penanggulangan masalahnya.</p> <p>Dibantu data rute dan statistik penumpang, juga data hasil monitoring kepadatan lalu lintas di tempat-tempat rawan macet, maka sistem ini juga membantu menyiapkan jalan-jalan alternatif yang bisa dipakai oleh masyarakat, baik yang bersifat tetap, atau bersifat sementara (buka – tutup)</p>
Organisasi	<input type="checkbox"/> Dinas Daerah.
Integrasi	Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Pemerintahan.
Info Tambahan	<p><input type="checkbox"/> Nama alias: --</p> <p><input type="checkbox"/> Dasar hukum: --</p> <p><input type="checkbox"/> Rekomendasi: --</p>

7.4.3. Modul TERMINAL

Modul	TERMINAL
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA
Sub-Blok Fungsi	SARANA DAN PRASARANA
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input checked="" type="checkbox"/> Front Office <input type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p> <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p> <input type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Publikasi informasi sarana dan prasarana terminal kepada masyarakat meliputi: terminal angkutan darat. <input type="checkbox"/> Melakukan standarisasi minimal informasi yang harus disediakan ke masyarakat berkaitan dengan kebutuhan akan sistem informasi terminal seperti: kepadatan lalu lintas, daya tampung kendaraan, status operasional dan kondisi fisik terminal, sarana dan fasilitas dasar apa yang disediakan, dan lain-lain. <input type="checkbox"/> Membuat peta tematik (GIS) sistem informasi terminal. Peta ini menunjukkan basis-data terminal, memudahkan mengetahui status operasional dan kondisi fisik terminal di seluruh wilayah yang ada. <input type="checkbox"/> Menginventarisasi data dan informasi sesuai dengan kebutuhan sistem informasi terminal tersebut diatas dan mempublikasikannya ke masyarakat luas. <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi yang memungkinkan monitoring penggunaan terminal (kepadatan lalu lintas) secara berkala, misal setiap satu jam, di tempat-tempat yang dikehendaki, dan mempublikasikannya kepada masyarakat.
Narasi	<p>Sistem informasi terminal, bersama-sama dengan sistem jalan dan jembatan, fungsinya menunjang kelancaran sistem transportasi darat. Melalui sistem ini, Pemerintah Daerah dapat mengevaluasi tingkat kesiapan dan kelayakan operasional sarana dan prasarana pendukung sistem transportasi tersebut seperti jalan, jembatan, terminal, serta dapat memprediksikan dengan lebih tepat masalah yang mungkin timbul, sehingga dapat menyiapkan langkah antisipasinya.</p> <p>Sistem ini juga membantu Pemerintah Daerah dalam menyiapkan kebijakan dan rencana program pembangunan di bidang transportasi, serta penyusunan skala prioritas pembangunan yang lebih tepat.</p>
Organisasi	<input type="checkbox"/> Dinas Daerah (Dinas Perhubungan).
Integrasi	Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan.
Info Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nama alias: -- <input type="checkbox"/> Dasar hukum: -- <input type="checkbox"/> Rekomendasi: --

7.4.4. Modul SARANA UMUM

Modul	SARANA UMUM		
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA		
Sub-Blok Fungsi	SARANA DAN PRASARANA		
Klasifikasi	Jenis Layanan	<input checked="" type="checkbox"/> Front Office	<input type="checkbox"/> Back Office
	Layanan Utama	<input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi	<input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan
		<input type="checkbox"/> Transaksi Data	<input type="checkbox"/> Pembayaran
		<input type="checkbox"/> Administrasi	<input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya
	Fungsi Aplikasi	<input type="checkbox"/> Generik	<input checked="" type="checkbox"/> Spesifik
	Obyek Layanan	<input type="checkbox"/> G2G	<input type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C
Fungsi	<input type="checkbox"/> Publikasi informasi sarana umum kepada masyarakat meliputi: taman kota, tempat bermain, fasilitas apa saja yang disediakan, dan lain-lain. <input type="checkbox"/> Melakukan standarisasi minimal informasi yang harus disediakan ke masyarakat berkaitan dengan kebutuhan akan sistem informasi sarana umum, seperti: tempat / lokasi, status operasional dan kondisi fisik, sarana dan fasilitas dasar apa yang disediakan, dan lain-lain. <input type="checkbox"/> Membuat peta tematik (GIS) sistem Informasi sarana umum. Peta ini menunjukkan basis-data sarana umum, memudahkan mengetahui status operasional dan kondisi fisik yang ada. <input type="checkbox"/> Menginventarisasi data dan informasi sesuai dengan kebutuhan sistem informasi sarana umum tersebut diatas dan mempublikasikannya ke masyarakat luas. <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi yang memungkinkan monitoring efektifitas pemanfaatan sarana umum oleh masyarakat.		
Narasi	Sistem ini membantu Pemerintah Daerah dalam mengevaluasi tingkat efektifitas pemanfaatan sarana umum yang disediakan, bagaimanapun status kelayakan operasional fasilitas pendukungnya, apakah perlu ditambah atau di relokasi / redistribusi, tempat mana saja yang memerlukan penambahan sarana / perbaikan fasilitas, dan lain-lain.		
Organisasi	<input type="checkbox"/> Dinas Daerah.		
Integrasi	Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Pemerintahan.		
Info Tambahan	<input type="checkbox"/> Nama alias: -- <input type="checkbox"/> Dasar hukum: -- <input type="checkbox"/> Rekomendasi: --		

7.4.5. Modul PENGAWASAN

Modul	FUNGSI PENGAWASAN		
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA		
Sub-Blok Fungsi	PENGAWASAN		
Klasifikasi	Jenis Layanan	<input checked="" type="checkbox"/> Front Office	<input type="checkbox"/> Back Office
	Layanan Utama	<input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi	<input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan
		<input type="checkbox"/> Transaksi Data	<input type="checkbox"/> Pembayaran
		<input type="checkbox"/> Administrasi	<input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya
	Fungsi Aplikasi	<input type="checkbox"/> Generik	<input checked="" type="checkbox"/> Spesifik
	Obyek Layanan	<input checked="" type="checkbox"/> G2G	<input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C
Fungsi	<input type="checkbox"/> Melaksanakan pemeriksaan terhadap tugas Pemerintah Kota yang meliputi pemerintahan, keuangan, kekayaan, perekonomian, BUMD, fisik prasarana, kesejahteraan masyarakat, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dan aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Magelang. <input type="checkbox"/> Melaksanakan pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap perangkat daerah. <input type="checkbox"/> Melaksanakan pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas perangkat daerah. <input type="checkbox"/> Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas.		
Narasi	Sistem ini membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Magelang menyangkut perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan di masing-masing SKPD.		
Organisasi	<input type="checkbox"/> BAWASKO		
Integrasi	Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan		
Info Tambahan	<input type="checkbox"/> Nama alias: SIM HP (SIM Hasil Pemeriksaan). <input type="checkbox"/> Dasar hukum: -- PP No. 79/2005. <input type="checkbox"/> Rekomendasi: -- untuk menyimpan dan menyajikan pengawasan yang lebih komunikatif serta keseragaman data badan pengawasan se-provinsi Jawa Tengah.		

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

PENGEMBANGAN ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kapasitas SDM yang sesuai dalam setiap pelaksanaan perlu disusun sehingga penugasan terhadap SDM yang melaksanakan kegiatan pengembangan E-Government dapat berjalan dengan baik, sedangkan pengembangan SDM dalam blueprint Pemerintah Kota Magelang dilakukan mengingat Sumber Daya Manusia adalah sarana yang paling utama untuk mengembangkan, mengelola maupun menggunakan E-Government. Sedangkan upaya pengembangan SDM sangat perlu guna mendukung E-Government ini antara lain bertujuan :

- Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya informasi serta pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi baik di kalangan pemerintah daerah otonom maupun di kalangan masyarakat dalam rangka mengembangkan budaya informasi ke arah terwujudnya masyarakat informasi (information society);
- Pemanfaatan sumber daya pendidikan dan pelatihan termasuk perangkat teknologi informasi dan komunikasi secara sinergis baik yang dimiliki oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah atau masyarakat;
- Pengembangan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi lembaga pemerintah;
- Peningkatan motivasi melalui pemberian atau apresiasi daripada seluruh SDM bidang informasi dan komunikasi di pemerintah yang secara aktif mengembangkan inovasi menjadi karya yang bermanfaat bagi pengembangan dan pelaksanaan E-Government;
- Perubahan pola pikir, sikap dan budaya kerja aparat pemerintahan yang mendukung pelaksanaan E-Government.

Tahap Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi :

1. Penatalaksanaan Organisasi Teknologi Informatika Kantor PDE.

NO	KEGIATAN	2007					
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN
1.	Koordinasi perencanaan dan pengelolaan teknologi informasi untuk mendukung E-Government.						
2.	Perencanaan organisasi TI di dinas-dinas yang terhubung dengan NOC.						
3.	Koordinasi pengelolaan Network Operating Center KPDE.						
4.	Pengaturan Network Policy kepada setiap dinas/satker yang terhubung dengan NOC.						
5.	Koordinasi pengelolaan dan perencanaan database.						
6.	Koordinasi pengelolaan database yang terhubung dengan NOC.						

2. Pembentukan Organisasi TI di Dinas/Satuan kerja.

NO	KEGIATAN	2007					
		JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Koordinasi perencanaan dan pengelolaan teknologi informasi untuk mendukung E-Government.						
2.	Prencanaan organisasi TI di dinas-dinas yang terhubung dengan NOC.						
3.	Koordinasi pengelolaan Network Operating Center KPDE.						
4.	Pengaturan Network Policy kepada setiap dinas/stker yang terhubung dengan NOC.						

3. Pelatihan Tenaga Ahli Administrator.

NO	KEGIATAN	2007			2008			2009		
		Apr	Mei	Jun	Apr	Mei	Jun	Jan	Feb	Mar
1.	Penunjukan tenaga administrator/ pengelola di dinas / satker.									
2.	Pelatihan Operating System.									
3.	Pelatihan LAN dan troubleshooting jaringan.									
4.	Penanganan virus.									

4. Pelatihan SDM Dinas-dinas untuk semua pegawai.

NO	KEGIATAN	2007			2008			2009		
		Okt	Nov	Des	Okt	Nov	Des	Okt	Nov	Des
1.	Pengenalan komputer.									
2.	Dasar Komputer.									
3.	Pengenalan Hardware.									
4.	Pengenalan Operating System.									
5.	Pelatihan internet dasar.									
6.	Pelatihan internet lanjut.									

5. Workshop jajaran pimpinan Eksekutif dan Legislatif.

NO	KEGIATAN	2007			2008			2009		
		Jul	Ags	Sep	Jul	Ags	Sep	Jul	Ags	Sep
1.	Workshop perkembangan e-Government.									
2.	Pemanfaatan TI dalam e-Government.									
3.	Dampak TI terhadap perilaku kerja.									
4.	Pemanfaatan infrastruktur E-Gov.									

6. Pembentukan Komunitas Teknologi Informasi Pemkot Magelang.

NO	KEGIATAN	2007			2008		
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
1.	Workshop pemanfaatan TI e-Gov Pemkot Magelang.						
2.	Pembentukan komunitas TI di lingkungan Pemkot Magelang.						
3.	Perumusan Visi-Misi-Action komunitas TI untuk menunjang e-Gov di Pemkot Magelang.						

7. Blue Print Sumber Daya Manusia 2010.

NO	KEGIATAN	2009		
		Okt	Nov	Des
1.	Evaluasi peran SDM terhadap keberhasilan e-Gov 2007-2009.			
2.	Penyusunan program pengembangan SDM 2010-2015.			

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO